



GUBERNUR JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 296 /KPTS/013/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2014 - 2019**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, perlu mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

KEDUA : Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi;

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun;
12. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro;
13. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang;
14. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan;
15. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim V Jember;
16. Dinas Pendidikan;
17. Dinas Kesehatan;
18. Dinas Sosial;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Peternakan;
24. Dinas Kehutanan;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
27. Dinas Perhubungan;
28. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
29. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;
30. Dinas Lingkungan Hidup;
31. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
32. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
34. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
35. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
36. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
37. Dinas Komunikasi dan Informatika;
38. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
39. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan;
40. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
41. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;
42. Biro Hukum;
43. Biro Administrasi Perekonomian;
44. Biro Administrasi Sumber Daya Alam;
45. Biro Administrasi Pembangunan;
46. Biro Organisasi;
47. Biro Umum;
48. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
49. Sekretariat DPRD;
50. Satuan Polisi

50. Satuan Polisi Pamong Praja;
51. Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
52. Rumah Sakit Paru Jember;
53. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
54. Rumah Sakit Kusta Kediri;
55. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
56. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
57. Rumah Sakit Paru Surabaya;
58. Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;
59. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
60. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
61. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
62. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
63. Rumah Sakit Haji Surabaya;
64. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
65. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati – Lawang;
66. Akademi Keperawatan Madiun; dan
67. Akademi Gizi Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Mei 2017



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Wakil Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dimaksud.
-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pahlawan 102 - 108 Telpn (031) 3554853-56, Fax. (031) 3534339
SURABAYA 60174

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 1477 / SKEP / V / 201.1 / 2017

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 maka Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan penyusunan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjadi Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 70, Seri E);
8. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 117, Seri E);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN , PERTAMA

- : Dengan Keputusan ini memberlakukan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

KEDUA

- : Perubahan Rencana Strategis seperti diktum pertama, meliputi:
1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari:
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
 2. Bab II Analisis Gambaran Pelayanan BAPPEDA, terdiri dari:
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA
 - b. Sumber Daya BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
 - c. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tahun 2009-2014
 - d. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Tahun 2015-2017
 3. Bab III Isu Strategis, terdiri dari:
 - a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA
 - b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur Jawa Timur
 - c. Telaahan Renstra BAPPENAS
 - d. Penentuan Isu-Isu Strategis
 - e. Analisis Strategis
 4. Bab IV Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan, terdiri dari:
 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 2. Strategi dan Arah Kebijakan

5. Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
6. Bab VI Penutup

- KETIGA** : Uraian secara rinci tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 tertuang di dalam buku Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 29 Mei 2017

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, MMT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580720 198903 1 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut selama proses pelaksanaan Perubahan Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sehingga kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan untuk 2018 – 2019 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amiin.

Surabaya, 29 Mei 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT.

Pembina Utama Madya
NIP. 19580720 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda.....	8
2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Jawa Timur	26
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2009 – 2016	28
2.3.1 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2009 – 2013.....	30
2.3.2 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2014	44
2.3.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2015 - 2016	55
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur.....	94
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA	96
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	96
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	98
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda	101
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	103
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	105
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	107

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	107
4.2 Strategi dan Kebijakan.....	113
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR	
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN IN DIKATIF	115
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	117
5.2 Indikator Kinerja.....	125
BAB 6 INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN	
DAN SASARAN RPJMD	170
BAB 7 PENUTUP	174

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Status Kepegawaian Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017	27
Tabel 2.2	PNS Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan Pangkat dan Golongan	27
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan PNS Bappeda Provinsi Jawa Timur	27
Tabel 2.4	Tingkat Pendidikan PTT Bappeda Provinsi Jawa Timur	28
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Tahun 2009-2013	32
Tabel 2.6	Capaian kinerja Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Tahun 2009 – 2013	34
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Program KISS Perencanaan Pembangunan SD Alam –LH	34
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	36
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	37
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Program Penyusunan Data dan Informasi Serta Pelaporan Pembangunan Daerah	38
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur 2009 - 2013.....	42
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur (dalam jutaan)	43
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2016	80
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2016.....	82

Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2016.....	83
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	100
Tabel 3.2	Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	101
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2015 - 2017	108
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2018 - 2019	111
Tabel 4.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2019	113
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Prioritas Bappeda Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Revisi Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014-2019	1177
Tabel 5.2	Indikator Program Bappeda Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Revisi Renstra Bappeda Prov. Jawa Timur 2014-2019	126
Tabel 5.3	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014-2019	1288
Tabel 5.4	Perubahan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur 2018-2019.....	1533
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2017	15371
Tabel 6.2	Tujuan dan Indikator Tujuan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2019	15372
Tabel 6.3	Perubahan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur 2018-2019.....	15373

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur.....	26
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan perubahan krusial Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

Hal ini berimplikasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Perubahan kelembagaan maupun struktur organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah yang pada akhirnya berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, mobilisasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan;
2. Perubahan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengharuskan mencabut Peraturan Daerah yang masih memuat kewenangan lama maupun melakukan revisi Peraturan Daerah yang belum mengakomodir kewenangan baru;
3. Perubahan terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Atas dasar hal-hal diatas, Pemerintah Provinsi telah menindaklanjuti perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud, termasuk diantaranya perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan dengan melakukan perubahan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan secara simultan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Organisasi Perangkat Daerah juga melakukan perubahan Renstra sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Bappeda Provinsi Jawa Timur sampai dengan periode berakhirnya RPJMD Tahun 2019.

Perubahan Renstra yang dilakukan adalah mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; serta
5. Penyesuaian sistematika penyusunan Renstra sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanpa memuat visi dan misi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, didasarkan pada tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu :

A. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang mengelaborasi berbagai perundang-undangan, referensi dan data yang menjadi acuan.

B. Penyusunan Rancangan Renstra

Tahapan ini terdiri dari dua tahap yaitu (a) tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan (b) Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.

C. Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

D. Penetapan Renstra

Rancangan Akhir yang telah diverifikasi akhir selanjutnya diajukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun rancangan rencana kerja

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2015;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 17) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 18) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 117 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Bappeda Provinsi Jawa Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2014-2019.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2014-2019;

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD tahun 2014 – 2019;
2. Sebagai dasar penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan;
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah;
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah;

6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
- 2.2 Sumber Daya Bappeda
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

BAB VII PENUTUP

BAB 2

ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Perangkat Daerah (PD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah penyusunan rencana kerja strategis PD

berdasarkan pada analisis internal PD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi PD, sumber daya berupa sumber daya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan PD pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Pasal 4 ayat 1) ditetapkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.

Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur, menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 70 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

A. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

B. Fungsi

- a) pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) pengelolaan administrasi keuangan;
- d) pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e) pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f) pengelolaan urusan rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- g) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial) di bidang kepegawaian;
- i) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan Sub Bagian Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar

Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan serta pengamanan perlengkapan dan aset.
 - f) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e) Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
 - f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang barang inventaris;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Ekonomi

A. Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana pembangunan di Bidang Ekonomi yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Kepariwisata

B. Fungsi

- a) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi;
- b) Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c) Penyusunan program perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana program pembangunan bidang ekonomi;
- e) Pelaksanaan koordinasi kegiatan - kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang ekonomi;
- f) Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi; dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi; 2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 3) Sub Bidang Pariwisata,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sub Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi
 - a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan perindustrian, perdagangan, investasi;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, investasi;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, investasi;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, investasi;
 - e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, investasi;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan, investasi; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- 2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :
 - a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

- e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Prasarana Wilayah

A. Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana pengembangan pembangunan di bidang Prasarana Wilayah yang meliputi Permukiman

dan Cipta Karya, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Prasarana Perhubungan

B. Fungsi

- a) pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah;
- b) pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah;
- c) penyusunan program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah;
- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
- e) pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di bidang prasarana wilayah;
- f) pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah; dan
- h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana Wilayah yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Permukiman dan Cipta Karya; 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan 3) Sub Bidang Prasarana Perhubungan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Permukiman dan Cipta Karya, mempunyai tugas :
 - a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang permukiman dan cipta karya;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang permukiman dan cipta karya;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup permukiman dan cipta karya;

- d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang permukiman dan cipta karya;
 - e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang permukiman dan cipta karya;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan permukiman dan cipta karya; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang lingkup prasarana sumber daya air, energi, sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang sumber daya air, energi, sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c) menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup sumber daya air, energi, sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang sumber daya air, energi, sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang sumber daya air, energi, sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan sumber daya air,

energi, sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- 3) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas :
 - a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang lingkup prasarana perhubungan;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang prasarana perhubungan;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup prasarana perhubungan;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang prasarana perhubungan;
 - e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang prasarana perhubungan;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan prasarana perhubungan; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Sosial Budaya

A. Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi kesejahteraan rakyat, pendidikan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Fungsi

- a) pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang sosial budaya;
- b) pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
- c) penyusunan program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;

- d) pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang sosial budaya;
- e) pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang sosial budaya;
- f) pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya; dan
- h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan dan 3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
 - a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang lingkup kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan KB;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan KB;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta Pengendalian Penduduk dan KB;

- e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan KB;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan KB; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang lingkup pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, keamanan, ketertiban dan pemerintahan;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, keamanan, ketertiban dan pemerintahan;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, keamanan, ketertiban dan pemerintahan;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, keamanan, ketertiban dan pemerintahan;
 - e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, keamanan, ketertiban dan pemerintahan;

- f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, perpustakaan, kearsipan, keamanan, ketertiban dan pemerintahan; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang lingkup tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b) menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c) menyiapkan bahan penyusunan program perencanaan pembangunan lingkup tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e) menyiapkan bahan analisis kajian kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

I. Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta serta pelaporan pelaksanaan pembangunan.

II. Fungsi

- a) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b) pelaksanaan pengelolaan data hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- c) pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah;
- d) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- e) penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan;
- f) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- h) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten/Kota; 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi dan 3) Sub Bidang Pelaporan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas :
 - a) menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan di kabupaten/kota;

- b) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota;
 - c) menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan di kabupaten/kota periode berikutnya;
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pelaksanaan dan hasil pembangunan Provinsi;
 - b) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Provinsi;
 - c) menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Provinsi periode berikutnya;
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Perangkat Daerah;
 - b) menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh Perangkat Daerah
 - c) menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
 - d) menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan
 - e) menyiapkan bahan penyusunan pelaporan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
 - f) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;

- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 117 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka terdapat 2 (dua) UPT di Bappeda Provinsi Jawa Timur, yaitu:

A. UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

I. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pelayanan data perencanaan dan pendanaan pembangunan Non APBD dan APBN.

II. Fungsi

- a) Penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang informasi data dan analisis pendanaan pembangunan;
- b) Penyelenggaraan pengkajian informasi data dan analisa pendanaan pembangunan;
- c) Menyiapkan bahan informasi data dan analisa pendanaan pembangunan;
- d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam menjalankan fungsi di atas, UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Seksi, yaitu : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan, dan 3) Seksi Pendanaan Pembangunan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e) melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan;
 - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- 2) Seksi Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan pelayanan data perencanaan pembangunan kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
 - b) melaksanakan pelayanan data perencanaan pembangunan kepada stakeholder dan publik secara langsung dan tidak langsung melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta sistem informasi perencanaan pembangunan lainnya;
 - c) melaksanakan pengelolaan website dan saran sistem informasi serta infrastruktur jaringan informatika Badan;
 - d) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan data perencanaan pembangunan; dan
 - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- 3) Sub Seksi Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan inventarisasi permasalahan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan untuk penyusunan rencana program pendanaan pembangunan;
 - b) melaksanakan penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan serta sistem informasi pengembangan pendanaan pembangunan;
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pendanaan alternatif;

- d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan; dan
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

B. UPT Penataan Ruang dan Geospasial

I. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penataan ruang dan geospasial meliputi pelayanan penataan ruang dan geospasial serta penyelenggaraan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

II. Fungsi

- a) Pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana tata ruang dan geospasial;
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang dan geospasial;
- c) Pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang;
- d) Pengelolaan Informasi Geospasial;
- e) Pelaksanaan koordinasi kelembagaan penataan ruang dan geospasial; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, UPT Penataan Ruang dan Geospasial dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Seksi, yaitu : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Penataan Ruang, dan 3) Seksi Geospasial yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

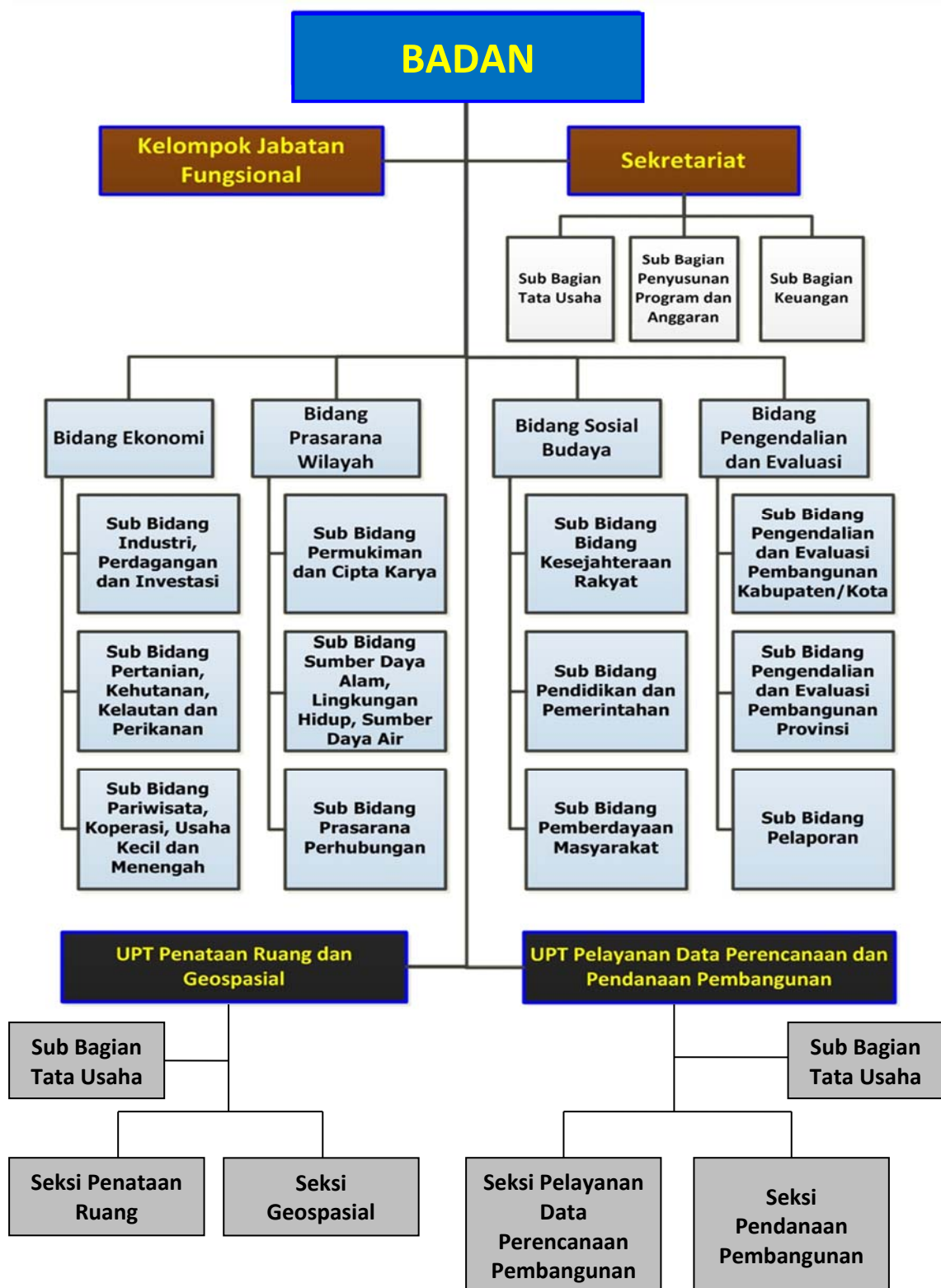
- 1) Sub Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e) melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan;
 - f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- 2) Seksi Penataan Ruang, mempunyai tugas :

- a) melaksanakan integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana tata ruang;
 - b) melaksanakan penyusunan rencana umum tata ruang;
 - c) melaksanakan evaluasi rencana tata ruang;
 - d) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e) menyiapkan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
 - f) melaksanakan fasilitasi kelembagaan penataan ruang; dan
 - g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- 3) Sub Seksi Geospasial, mempunyai tugas:
- a) melaksanakan integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan lingkup geospasial;
 - b) melaksanakan penyusunan rencana geospasial skala makro;
 - c) melaksanakan fasilitasi kelembagaan geospasial;
 - d) melaksanakan pengelolaan informasi geospasial; dan
 - e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

7. Kelompok Pejabat Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 117 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Bappeda Provinsi Jawa Timur, struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertera pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Jawa Timur

Sumber daya merupakan potensi yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, salah

satunya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 247 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Status

Keseluruhan sumber daya manusia di Bappeda Provinsi Jawa Timur berjumlah 243 orang dengan status kepegawaian yang terbagi atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT - PK), sebagaimana tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Status Kepegawaian Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	192
2	PTT	46
	Jumlah	238

2. Pangkat dan Golongan

PNS Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan pangkat golongan jabatan sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 PNS Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	40
2.	Golongan III	90
3.	Golongan II	60
4.	Golongan I	2
	Jumlah	192

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai PNS dan PTT-PK di Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan pendidikan sebagaimana tertera pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan PNS Bappeda Provinsi Jawa Timur

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	0
2.	SMP/Sederajat	2
3.	SMA/Sederajat	72
4.	D-1	1

No.	Pendidikan	Jumlah
5.	D-3	5
6.	S-1	58
7.	S-2	52
8.	S-3	2
	Jumlah	192

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan PTT Bappeda Provinsi Jawa Timur

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SMP/Sederajat	13
2.	SMA/Sederajat	7
3.	S1	24
	Jumlah	2

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2009 – 2016

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda, kinerja pelayanan yang dicapai selama 8 (delapan) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
2. Tersusunnya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
3. Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2009
 - 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2010 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
 - 3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010
 - 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2009
 - b. Tahun 2010
 - 1) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur
 - 2) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur

- 3) Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2011
- 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2010
- c. Tahun 2011
 - 1) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur
 - 2) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
 - 3) Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2012
 - 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2011
- d. Tahun 2012
 - 1) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur
 - 2) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
 - 3) Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2013
 - 4) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2012
- e. Tahun 2013
 - 1) Penyusunan RKPD Perubahan tahun 2013
 - 2) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur
 - 3) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
 - 4) Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2014
 - 5) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2013
- f. Tahun 2014
 - 1) Penyusunan RKPD Perubahan tahun 2014
 - 2) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur
 - 3) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
 - 4) Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2015
 - 5) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2014
- g. Tahun 2015
 - 1) Penyusunan RKPD Perubahan tahun 2015
 - 2) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur

- 3) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
- 4) Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2016
- 5) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2015
- h. Tahun 2016
 - 1) Penyusunan RKPD Perubahan tahun 2016
 - 2) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur
 - 3) Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur
 - 4) Penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2017
 - 5) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2016
4. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 diantaranya:
 - a. Tersusunnya Jawa Timur Dalam Angka setiap tahun;
 - b. Tersusunnya data PDRB setiap tahun;
 - c. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis;
 - d. Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi pembangunan daerah secara berkala sebanyak 4 kali pada setiap tahun;
 - e. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur setiap tahun;
 - f. Keikutsertaan dalam pameran-pameran promosi dan investasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - g. Tersusunnya buku kajian masalah-masalah aktual di Provinsi Jawa Timur.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2009 – 2013

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2009 - 2013, telah tercapai dengan baik, dengan rasio capaian realisasi kinerja sebesar 100% sebagaimana tertera pada Tabel 2.11. Berdasarkan hal capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, selama 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan tugas dan fungsi masing-

masing unit kerja dalam struktur Bappeda Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, capaian kinerja pembangunan dan layanan publik Bappeda Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2009 - 2013, dapat juga dilihat berdasarkan indikator-indikator kinerja pada masing-masing program yang juga menunjukkan hal – hal yang positif sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang

Capaian indikator kinerja Program Perencanaan Tata Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu system wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
- Tersusunnya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) secara optimal sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Timur dan rujukan koordinasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah di Jawa Timur;
- Sinkronisasi Rencana Tata Ruang yang sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah;
- Mendorong perwujudan rencana pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah di Jawa Timur;
- Peningkatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan antarwilayah di Jawa Timur.

2. Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Ruang

Kinerja Program Pemanfaatan Ruang dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut :

- Perwujudan operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rujukan koordinasi pembangunan antar-sektor dan antar-wilayah;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang di Jawa Timur;
- Sinkronisasi rencana pengembangan wilayah secara spasial dengan

rencana pembangunan sektoral.

3. Capaian Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaat Ruang dimaksudkan untuk capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Menyediakan fasilitas pelayanan publik untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam hal penataan ruang;
- Sinkronisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

4. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan dan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Perencana guna mendukung perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.
- Tersusunnya dokumen petunjuk pelaksanaan kerja jabatan fungsional dalam mendukung perencanaan program pembangunan.

Ukuran keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Tahun 2009-2013

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Koordinasi Fungsional Perencana dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Timur	Kali	-	1	2	5	4
Koordinasi dan Konsultasi Fungsional Perencana dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang	1	1	1	1	1
Penyusunan strategi kebijakan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	-	1	2	4	2

5. Capaian Kinerja Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan.

Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan dipergunakan sebagai langkah awal untuk menggali semua permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat teridentifikasi isu-isu prioritas yang dapat menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Utama. Melalui forum KISS yang dilakukan dengan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat menampung semua aspirasi dari semua kalangan sehingga dapat tercapai keselarasan perencanaan pembangunan baik dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat bersinergi dalam rangka mendukung kinerja kerangka pembangunan ekonomi daerah.

Program ini juga bertujuan untuk membangun sistem prosedur dan standar kerja organisasi dalam pencapaian kinerja, penyelenggaraan Pemerintah melalui tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk menyinkronkan dan menyinergikan perencanaan pembangunan guna mengoptimalkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan provinsi yaitu dengan melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Ekonomi, Prasarana Wilayah, Pengembangan Regional dan Pembiayaan Pembangunan dengan sasaran terlaksananya sinkronisasi dan sinergi Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait (asosiasi, perguruan tinggi, dll) untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif.

Keberhasilan sasaran pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Capaian kinerja Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Tahun 2009 – 2013

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya	Kali	27	0	0	0	0
2	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Masyarakat	Kali	0	24	28	12	6
3	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kali	5	5	6	6	6
4	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Paket	1	1	1	1	1
5	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	Kali	14	7	12	15	9
6	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Prasarana Wilayah	Paket	1	11	1	1	1
7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembiayaan Pembangunan	Kali	-	5	4	5	4
8	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembiayaan Pembangunan	Paket	1	1	1	1	1
9	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Regional	Kali	2	2	2	2	2
10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Regional	Paket	1	1	1	1	1

Adapun Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai implementasi tugas/fungsi instansi perencana dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Keberhasilan sasaran pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Program KISS Perencanaan Pembangunan SD Alam –LH

URAIAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
	SATUAN	2009	2010	2011	2012	2013
KIS Data Spasial Kab/Kota se jatim	kali	-	1	1	1	1
Peningkatan SDM pengelola Data Spasial	PD	-	-	11	11	-
Katalog Peta Digital Provinsi Jawa Timur	Buku	-	-	1	-	-
KIS Perencanaan program SD Alam dan LH	kali	1	1	1	1	1

Terkait dengan kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Data Spasial dapat disampaikan beberapa hal berikut ini. Kegiatan dimaksud dilaksanakan sejak tahun 2010, utamanya adalah dalam rangka pelaksanaan Simpul Jaringan Data Spasial Daerah (SJ-DSD) Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 23 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010. SJ-DSD Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 tentang JDSN. Pelaksanaan SJ-DSD Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan BAKOSURTANAL selaku PSJ (Penghubung Simpul Jaringan) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2011 tentang BIG tanggal 27 Desember 2011. Dalam periode Tahun 2010 – 2013, telah dicapai berbagai kinerja seperti :

- Koordinasi dengan BAKOSURTANAL/BIG, SKPD Provinsi terkait dan Kab/Kota.
- Peningkatan SDM pengelola Data Spasial terkait instalasi aplikasi pendukung JDSN, pembuatan, pengelolaan, publikasi, review dan upload data spasial/metadata.
- Penyediaan informasi spasial berupa Katalog Peta Digital Provinsi Jawa Timur yang berisi 70 (tujuh puluh) peta spasial berbagai bidang, antara lain perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, energy dan sumber daya mineral, kehutanan, pertanian serta perikanan dan kelautan.

Berikut ini adalah salah satu visualisasi peta (base map) SJ-DSD Provinsi Jawa Timur dengan software ASrc Gis 10 Tahun 2011.

Pada akhir tahun 2013 diharapkan dapat dibangun web aplikasi SJ-DSD Provinsi Jawa Timur yang terkoneksi dengan BAKOSURTANAL/BIG selaku PSJ *serta up load* Peta SJ-DSD Provinsi Jawa Timur dalam web aplikasi dimaksud.

Adapun terkait dengan kegiatan KIS Perencanaan Program Pembangunan SD Alam dan LH pada periode 2009 - 2013, telah

dilaksanakan berbagai kegiatan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, koordinasi dengan SKPD pelaksana program pembangunan SD Alam dan LH serta Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam rangka integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan SD Alam dan LH.

6. Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Sasaran Program Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah untuk mengetahui Progres Kinerja maupun penyerapan anggaran Program/Kegiatan SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara triwulanan maupun tahunan dengan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan guna peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Triwulanan dan Tahunan	dokumen	-	4	4	4	4
Pedoman monitoring dan evaluasi SKPD Provinsi dalam melaksanakan RAD PK	dokumen	-	2	-	-	-
Dokumen evaluasi pelaksanaan program pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah	dokumen	-	6	-	-	-
Laporan pelaksanaan DAK	dokumen	-	1	1	4	4
Dokumen Verifikasi Rencana Aksi Kabupaten/Kota se Jatim dalam mendukung INPRES 3 Tahun 2010	dokumen	-	-	-	4	4
Dokumen pelaksanaan dana APBN Provinsi dan Kabupaten/ Kota	dokumen	-	-	-	4	4

7. Capaian Kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan digunakan untuk Meningkatkan partisipasi lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mendukung prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelatihan dan pengadaan sistim Informasi. Program SCBDP merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kementerian Dalam Negeri, Bank Pembangunan Asia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan PT IDI Kajang Consultan.

Capaian program dalam rangka mendukung pembangunan untuk Kelangsungan Hidup Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak khususnya dibidang pendidikan, Kesehatan, Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Keluaran dari Program SCBDP adalah Koordinasi (lintas SKPD, Team leader), lokakarya penyusunan Pedoman Analisis Responsif Gender (ARG) survey pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pelatihan. Pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Koordinasi Penguatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Kali	0	3	3	2	2

Adapun capaian kinerja yang lainnya adalah Tersusunnya Anual Work Plan (AWP) pada Pendampingan terhadap fasilitasi kegiatan Australia Indonesia Partnership For Decentralization di Provinsi Jawa Timur.

8. Capaian Kinerja Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah

Program Penyusunan Data dan informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan tujuan agar tersedia Data dan Informasi hasil serta potensi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah serta menginformasikan kepada pemerintah pusat dan stake holder tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah serta potensi yang perlu dikembangkan di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tertentu.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Program Penyusunan Data dan Informasi Serta Pelaporan Pembangunan Daerah

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Buku Data/Informasi hasil pelaksanaan pembangunan	buku	-	2	2	2	2
Informasi hasil pelaksanaan pembangunan dalam bentuk video	paket	-	11	-	-	-
Buku Data Dinamis	buku	-	2	4	2	4
Buku Saku	buku	-	2	2	2	1
Buku Potensi dan Prioritas Pembangunan Kab/Kota	buku	-	-	1	1	1
Laporan dan informasi anggaran APBD dan APBN	dokumen	-	3	-	-	-
Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan melalui Media TV	kali	-	3	3	3	3
Duratrans Hasil Pelaksanaan Pembangunan	kali	-	2	2	2	2
Visualisasi selang pandang hasil pelaksanaan pembangunan Jawa Timur Triwulan I, II dan III	paket	-	3	3	3	3
Visualisasi potensi unggulan Jawa Timur	paket	-	-	-	1	-
Visualisasi sentra agro bisnis Jawa Timur	paket	-	-	-	1	-
Laporan Kinerja SKPD Provinsi Triwulan dan Tahunan	dokumen	-	5	5	4	4
Laporan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur	dokumen	-	3	3	3	3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur	dokumen	-	1	1	1	1
Pengelolaan Website Bappeda	paket	-	1	1	1	1

Uraian	Capaian Kinerja Program					
	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Pengelolaan Pusat Data Provinsi	paket	-	1	1	1	1

9. Capaian Kinerja Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan dimaksudkan untuk mempersiapkan bahan rekomendasi dalam perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan melalui analisa atau kajian akademik terkait perencanaan pembangunan prasarana wilayah dengan sasaran tersedianya rekomendasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut antara lain adalah dokumen yang menjadi rekomendasi atau hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD dan rekomendasi yang digunakan sebagai pendukung perencanaan pembangunan yang diharapkan akan mendorong berbagai upaya peningkatan pelayanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.

Capaian kinerja program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan adalah terakomodirnya rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan sebagai bahan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur serta rekomendasi pendukung perencanaan pembangunan lainnya.

Tersedianya kajian kebijakan penyusunan program pembangunan daerah pada tahun 2009 – 2013 utamanya ada pada :

- Terselenggaranya Pendampingan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Penyusunan P-APBD Jawa Timur dan RAPBD Jawa Timur;
- Tersusunnya Pengolahan Data Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota;
- Tersusunnya dokumen Data Base Hasil Musrenbang;
- Dokumen Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur;
- Dokumen Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi

Daerah);

- Dokumen Analisis Hubungan Antara Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten dan Kota di Jawa Timur;
- Dokumen Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Amum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Timur;
- Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur;
- Tersusunnya Strategi Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan.

10. Capaian Kinerja Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah

Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan Program Pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi. Capaian kinerja program pada tahun 2009 – 2013 utamanya pada :

- Terselenggaranya Musrenbang Nasional, Provinsi dan Regional
- Tersedianya fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota
- Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahannya
- Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Hubungan Internasional antara Provinsi Jatim dengan Negara Sahabat dan Lembaga Donor
- Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) PD
- Terselenggaranya Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur dan Penyusunan Perubahan APBD Jawa Timur

- Tersusunnya Perencanaan Pemanfaatan Aset Pemerintah Jawa Timur
- Tersedianya bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- Tersusunnya Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur
- Terselenggaranya Rapat Musrenbangreg dan terbentuknya Sekretariat Bersama Bappeda Provinsi Regional Jawa-Bali
- Tersusunnya Dokumen Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kab/Kota di Jawa Timur;
- Terselenggaranya koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua dalam Rangka Pencapaian Target MDGs.
- Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi dalam sharing pembiayaan pembangunan dengan kabupaten/Kota Bidang : Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Kemiskinan;
- Tersedianya fasilitasi Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Capaian kinerja pembangunan dan layanan publik Bappeda Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2013, tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Bappeda, baik sumber daya manusia, aset maupun anggaran yang memadai dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun *performance* positif Bappeda Provinsi Jawa Timur, tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pembangunan akan tetapi juga ditunjukkan melalui realisasi anggaran sesuai pagu yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2009 - 2013, seperti pada Tabel 2.12.

Berdasarkan Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa rasio antara anggaran dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 95,07 persen dan rasio terendah terjadi pada tahun 2012 dengan rasio sebesar 91,23 persen dengan demikian, rata-rata rasio realisasi anggaran selama periode 2009 - 2013 mencapai 92,71 persen.

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur 2009 - 2013

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-			80%					80%			100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-			80%					80%			100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan	-	-	-			75%					75%			100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP Bappeda Provinsi Jatim

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur (dalam jutaan)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA BAPPEDA	99.251,47	96.555,65	113.555,47	104.768,84	98.411,48	91.078,35	91.796,86	106.542,05	95.576,88	90.219,08	91,77	95,07	93,82	91,23	91,68	102.508,58	95.042,65
Belanja Tidak Langsung	10.482,36	11.431,18	12.092,82	12.841,51	12.914,65	9.293,68	11.011,69	11.610,01	12.060,82	12.548,34	88,66	96,33	96,01	93,92	97,16	11.952,50	11.304,91
Belanja pegawai	10.482,36	11.431,18	12.092,82	12.841,51	12.914,65	9.293,68	11.011,69	11.610,01	12.060,82	12.548,34	88,66	96,33	96,01	93,92	97,16	11.952,50	11.304,91
Belanja Langsung	88.769,11	85.124,47	101.462,65	91.927,33	85.496,83	81.784,67	80.785,17	94.932,04	83.516,06	77.670,74	92,13	94,9	93,56	90,85	90,85	90.556,08	83.737,74
Belanja pegawai	19.632,81	21.334,16	25.790,78	25.450,99	26.348,07	17.408,46	20.387,41	24.423,70	24.100,03	24.865,32	88,67	95,56	94,7	94,69	94,37	23.711,36	22.236,98
Belanja barang dan jasa	66.904,56	60.995,22	70.138,95	59.326,47	55.671,85	62.226,64	57.729,86	66.287,57	55.687,82	49.528,36	93,01	94,65	94,51	93,87	88,96	62.607,41	58.292,05
Belanja modal	2.231,73	2.795,10	5.532,92	7.149,87	3.476,92	2.149,58	2.667,91	4.220,77	3.728,21	3.277,05	96,32	95,45	76,28	52,14	94,25	4.237,31	3.208,70
Total	99.251,47	96.555,65	113.555,47	104.768,84	98.411,48	91.078,35	91.796,86	106.542,05	95.576,88	90.219,08	91,77	95,07	93,82	91,23	91,68	102.508,58	95.042,65

2.3.2 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2014

Capaian kinerja pembangunan dan layanan publik Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator-indikator kinerja pada masing-masing program tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang

Capaian kinerja Program Perencanaan Tata Ruang adalah tersedianya Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, yang berisi Inventarisasi Permasalahan, Analisa, dan Rencana Penanganan Permasalahan Penataan Ruang Wilayah dengan anggaran Rp. 107.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 89.720.000,00 atau 83,75%.

2. Capaian Kinerja Program Pemanfaatan Tata Ruang

Capaian kinerja Program Pemanfaatan Tata Ruang adalah tersedianya Dokumen Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang dengan anggaran Rp. 712.441.320,00 dan realisasi sebesar Rp. 679.887.780,00 atau 95,43%.

3. Capaian Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Capaian kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang adalah tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur secara online dengan anggaran Rp. 210.394.880,00 dan realisasi sebesar Rp. 146.899.895,00 atau 69,82%.

4. Capaian Kinerja Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan

Capaian Kinerja Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 27.076.745.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 24.433.579.660,00 atau 90,24% adalah sebagai berikut:

- a) Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) Perencanaan Pembangunan dengan 38 kabupaten/kota dan seluruh SKPD pada tahun 2014
- b) Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) Jawa Timur

- c) Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP)
- d) Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
- e) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
- f) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
- g) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Rencana Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
- h) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Kelembagaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
- i) Terlaksananya koordinasi dan monitoring yang menunjang pelaksanaan pembangunan jalan lintas selatan
- j) Terlaksananya fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam penyusunan Memoranda Program Sanitasi Kab./Kota (11 kab./kota), Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) / Memorandum Program Sanitasi (MPS) di 3 Kab./Kota, penjaminan mutu dokumen PPSP, serta fasilitasi pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) II sebagai implementasi dari Program PPSP
- k) Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Water Resources and Irrigation Sector Management Programme 2 (WISMP 2)
- l) Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder terkait guna sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana program pembangunan prasarana sumber daya air, prasarana perhubungan dan prasarana keciptakarya
- m) Terlaksananya koordinasi dan monitoring yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Water Resources and Irrigation Sector Management Programme 2 (WISMP 2)
- n) Terlaksananya koordinasi dan monitoring yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

- o) Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi dalam rangka penyiapan program konservasi mata air umbulan untuk mendukung pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan
- p) Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD-MDGs) Provinsi Jawa Timur
- q) Dokumen Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah - Millenium Development Goals (RAD - MDGs)
- r) Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- s) Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- t) Koordinasi permasalahan dan Issu Strategis pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan tahun 2014
- u) Dokumen Inventarisasi Permasalahan dan Issue-Issue Strategis bidang pemerintahan dan kemasyarakatan Jawa Timur tahun 2014
- v) Dokumen kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
- w) Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional - Hak Asasi RANHAM Tahun 2014
- x) Fasilitasi Pelaksanan TNI Manunggal Desa (TMMD) tahun 2014
- y) Koordinasi percepatan pencapaian target-target MDGs dengan hasil adanya saran dan masukan dalam rangka pencapaian target indikator Millenium Development Goals (MDGs) di Jawa Timur, sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kab/Kota serta stakeholder dalam rangka pencapaian target indikator Millenium Development Goals (MDGs) di Jawa Timur, pemecahan masalah pencapaian target indikator Millenium Development Goals (MDGs) di Jawa Timur
- z) Koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dengan melibatkan SKPD dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab/Kota untuk:
 - Revitalisasi Sekretariat TKPKD dan Penguatan Kelembagaan TKPKD Dalam Pelaksanaan Siklus Perencanaan Dan Penganggaran Tahunan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

- Pelatihan Monitoring dan Evaluasi untuk tim teknis TKPKD dalam program-program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Outcome;
- aa) Untuk percepatan pembangunan lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan maka dilaksanakan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi serta inventarisasi isu-isu strategis dan permasalahan yang ada, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan program strategis dan prioritas. Hasil yang diperoleh adalah terinventarisasinya isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan serta program prioritas penanganan masalah lingkup pemerintahan dan kemasyarakatan
 - bb) Terlaksananya koordinasi rencana pembiayaan pembangunan Jawa Timur tahun 2015
 - cc) Terlaksananya koordinasi rencana Kemitraan Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2015
 - dd) Terlaksananya koordinasi Rancangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan RKPD Tahun 2015
 - ee) Terlaksananya koordinasi perencanaan Kemitraan pembiayaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015
 - ff) Bahan masukan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun 2015
 - gg) Tersusunnya dokumen kebijakan Bidang Pembiayaan Pembangunan
 - hh) Terlaksananya koordinasi rencana program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) di Jawa Timur Tahun 2015
 - ii) Tersedianya Data Spasial Tematik di Jawa Timur yang terintegrasi dalam satu referensi secara online
 - jj) Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Rencana Program Tata Ruang yang diakomodir dalam RKPD. Dokumen tersebut berisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), inventarisasi permasalahan pengembangan wilayah sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kebijakan strategi pengembangan wilayah sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rencana program dan kegiatan pengembangan wilayah sumberdaya alam dan lingkungan hidup, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Jawa Timur

kk) Tersedianya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Rencana Program Tata Ruang, yang berisi juga tentang kluster kewilayahan.

5. Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Capaian kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dengan anggaran Rp. 1.835.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.459.437.481,00 atau 78,74% adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen pelaksanaan dana APBN Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur
- b) Dokumen Laporan pelaksanaan DAK di Jawa Timur
- c) Dokumen Rencana Aksi Provinsi dan Kab/Kota se Jatim dalam mendukung INPRES 2 Tahun 2014
- d) Laporan hasil verifikasi UKP4 pelaksanaan INPRES 2 Tahun 2014 di Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- e) Rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan SKPD Provinsi dan Kab/ Kota se Jawa Timur.

6. Capaian Kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Capaian kinerja Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan dengan anggaran Rp. 3.456.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.048.018.365,00 atau 88,19% adalah sebagai berikut:

- a) Terealisasinya Program AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralization) di Provinsi Jawa Timur dan 4 Kabupaten, Situbondo, Sampang, Malang dan Trenggalek yang berupa:
 - Modeling BLU RSUD Rujukan di BP4 Pamekasan sampai status meningkat menjadi RSUD; 10 Puskesmas di Malang telah menjadi BLUD dan 10 Puskesmas di Situbondo telah dinilai layak menjadi BLUD
 - Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bappeda Provinsi, Kab. Sampang, Situbondo dan Trenggalek telah menghasilkan SOP dan Worksheet serta pembentukan Satgas Pengendalian Internal;

- Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
 - Pelaksanaan fungsi Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim yang baru dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berjalan lancar dengan tersedianya instrument dan pedoman Penanganan Sengketa.
- b) Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan United Nation dengan lembaga Donor, yang bertujuan :
- Mengetahui perkembangan Kota Layak Anak (KLA) Provinsi di 3 (tiga) lokasi Kabupaten/Kota kerjasama dengan UNICEF (Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kota Pasuruan);
 - Mengetahui perkembangan dukungan UNICEF sesuai dengan kesepakatan pada tujuan tengah program;
 - Rekomendasi upaya-upaya perbaikan capaian program.

7. Capaian Kinerja Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 4.306.081.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.743.336.454,00 atau 86,93% adalah sebagai berikut:

- a) Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- b) Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur;
- c) Buku Data Dinamis Triwulanan;
- d) Buku Potensi Jawa Timur;
- e) Tersusunnya analisa data hasil pelaksanaan pembangunan;
- f) Visualisasi selang pandang hasil pelaksanaan pembangunan Jawa Timur;
- g) Sosialisasi dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan melalui media TV;
- h) Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir tahun 2013 beserta lampirannya;
- i) Buku laporan capaian kinerja SKPD Provinsi Tahunan dan Triwulanan;
- j) Buku Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur;
- k) Pusat data dan pengelolaan website Bappeda Provinsi Jawa Timur;

- l) Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur;
- m) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2013.

8. Capaian Kinerja Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan dengan anggaran Rp. 19.599.043.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.903.617.800,00,00 atau 91,35%, adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan di Jawa Timur;
- b) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
- c) Dokumen Kajian Kebijakan Penataan Ruang Jawa Timur dalam Mengantisipasi Dinamika Pembangunan;
- d) Dokumen Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pelabuhan Teluk Lamong dan Sekitarnya di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;
- e) Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Timur;
- f) Dokumen Penyusunan Daya Dukung Ruang untuk Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Pantura Jawa Timur;
- g) Dokumen Penyusunan Instrumen Pendukung Implementasi Penataan Ruang di Jawa Timur;
- h) Dokumen Penyusunan KLHS Wilayah Manyar Gresik dan Sekitarnya;
- i) Dokumen Kajian Penyusunan Strategi Kelembagaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) di Jawa Timur;
- j) Dokumen Background Study Pembangunan Wilayah Terpadu di Jawa Timur;
- k) Dokumen Perumusan Sistem Pusat Kegiatan Ditinjau Berdasarkan Kebutuhan Pengembangan dan Pelayanan Wilayah di Jawa Timur;
- l) Dokumen Pengembangan Tenaga Angin Sebagai Sumber Energi Alternatif Di Jawa Timur;
- m) Dokumen Analisis Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di Pulau Madura dan Kepulauan;

- n) Tersusunnya Dokumen Indikator Daya Saing Industri Jawa Timur dalam Menghadapi AEC 2015;
- o) Survey Penyediaan dan Penggunaan Barang Industri Jawa Timur Tahun 2014 yang belum dapat dilaksanakan;
- p) Tersusunnya strategi pemanfaatan nilai ekonomi air irigasi sebagai basis pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya air irigasi yang semakin terbatas;
- q) Tersusunnya sebuah kerangka umum rencana induk pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dapat mendukung tercapainya ketahanan pangan di Jawa Timur secara lestari;
- r) Tersusunnya kerangka strategi pembangunan infrastruktur hijau di wilayah Gerbangkertasusila, Jawa Timur;
- s) Tersusunnya arahan pengembangan dan strategi penanganan pengelolaan sumber daya air yang dikaitkan dengan target pasca MDGs 2015 yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur;
- t) Tersusunnya strategi dan program pembangunan infrastruktur pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat;
- u) Tersusunnya sebuah kerangka strategi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dengan menggunakan konsep ekohidrologi untuk mendukung program konservasi sumber daya air;
- v) Tersusunnya sistem operasi dan pemeliharaan irigasi secara komprehensif pada daerah irigasi multiguna kewenangan pemerintah provinsi sehingga dapat memberikan jaminan bagi pengelolaan infrastruktur irigasi serta keberlanjutan produksi pangan di Jawa Timur;
- w) Tersusunnya sebuah kerangka strategi antisipasi dan jalan keluar dari fenomena el-nino terhadap berbagai persoalan sumber daya air yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan di Jawa Timur;
- x) Tersusunnya rekomendasi kelayakan aspek teknis, ekonomis, finansial, lingkungan dan aspek sosial ekonomi untuk rencana pengembangan (FS) SPAM Regional Wilayah Malang Raya (Kab./Kota Malang dan Kota Batu);

- y) Tersusunnya rekomendasi kelayakan aspek teknis, ekonomis, finansial, lingkungan dan aspek sosial ekonomi untuk rencana pengembangan (FS) SPAM Regional Wilayah Pantura (Kab Lamongan, Bojonegoro, Tuban dan Gresik);
- z) Tersusunnya rekomendasi kelayakan aspek teknis, ekonomis, finansial, lingkungan dan aspek sosial ekonomi untuk rencana pengembangan (FS) SPAM Regional Wilayah Madura (Kab. Bangkalan, Sampang, pamekasan, dan Sumenep);
- aa) Tersusunnya Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur;
- bb) Tersusunnya identifikasi lokasi untuk rencana pengembangan SPAM Regional Wilayah Lintas Timur (Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi);
- cc) Tersusunnya identifikasi lokasi untuk rencana pengembangan SPAM Regional Wilayah Lintas Selatan (Kab. Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung);
- dd) Tersusunnya Strategi Pengelolaan Air Minum Pasca Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai dukungan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan;
- ee) Tersusunnya strategi kebijakan transportasi orang, barang, dan jasa antar kabupaten/kota di Jawa Timur yang semakin efisien, efektif, ramah manusia, dan ramah lingkungan serta bisa mendorong terciptanya jaringan distribusi barang dan jasa menjadi semakin kompetitif;
- ff) Tersusunnya panduan pengembangan system transportasi di Jawa Timur yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta mampu menjadi tulang punggung system logistic di Jawa Timur yang semakin kompetitif;
- gg) Tersusunnya strategi meningkatnya produk-produk unggulan dari Jawa Timur dan kian menyempitnya disparitas antar daerah yang selama ini menjadi persoalan serius di Jawa Timur;
- hh) Tersusunnya tersusunnya strategi pengembangan infrastruktur maritime di Jawa Timur yang dapat meningkatkan konektivitas inter wilayah Jawa Timur maupun antar wilayah Jawa Timur dengan wilayah kepulauan lainnya;

- ii) Tersusunnya kebijakan yang komprehensif terkait transportasi dari dan menuju Jawa Timur dari wilayah Indonesia Bagian Timur yang bisa mendorong terciptanya jaringan distribusi barang dan jasa menjadi semakin kompetitif;
- jj) Tersusunnya pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan jalan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan akibat perkembangan perekonomian di Jawa Timur;
- kk) Tersusunnya rumusan potensi dan program pengembangan kereta api di kawasan Gerbangkertasusila;
- ll) Tersusunnya rumusan indikasi program pengembangan pelayanan barang pada pelabuhan untuk menunjang perkembangan perekonomian wilayah di Jawa Timur;
- mm) Tersusunnya rumusan indikasi program pengembangan bandara untuk menunjang perkembangan perekonomian wilayah di Jawa Timur;
- nn) Tersusunnya rumusan indikasi program pengembangan infrastruktur prioritas di kawasan perhatian investasi di Jawa Timur;
- oo) Tersusunnya kerangka strategi pengembangan infrastruktur jalan yang dapat mendukung peningkatan daya saing produk pangan di Jawa Timur;
- pp) Tersusunnya strategi peningkatan layanan transportasi antar wilayah di Jawa Timur seiring dengan implementasi MEA 2015;
- qq) Tersusunnya kerangka strategi pengembangan infrastruktur transportasi darat di kawasan selatan Jawa Timur yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan;
- rr) Dokumen Penyusunan Data Statistik Pelaksanaan Pembangunan Povinsi Jawa Timur Tahun 2014;
- ss) Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2104;
- tt) Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2104;
- uu) Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;

- vv) Dokumen Analisis Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2015;
- ww) Dokumen Analisis Belanja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Perencanaan Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- xx) Dokumen Analisis Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- yy) Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Infrastruktur di Jawa Timur;
- zz) Dokumen Analisis Pemetaan UMKM dalam rangka Optimalisasi Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jatim;
- aaa) Dokumen Analisis Pendapatan BLUD Provinsi Jawa Timur.

9. Capaian Kinerja Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah

Capaian kinerja Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah n dengan anggaran Rp. Rp. 8.021.476.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 6.941.803.510,00 atau 86,54%, adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi Usulan Prioritas rencana kegiatan untuk bahan Pelaksanaan Musrenbang Nasional Tahun 2014;
- b) Sosialisasi Sistem E-Musrenbang terkait usulan APBN Pendanaan Dekon dan Tugas Pembantuan;
- c) Sinkronisasi data bahan penyusunan RKPD dan RKP dalam Musrenbang Propinsi Tahun 2014;
- d) Data bahan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan RKP Tahun 2015;
- e) Koordinasi dan sinkronisasi data isue-isue yang berkembang di Regional se Jawa - Bali Tahun 2014;
- f) Kesepakatan data isue-isue di regional Jawa-Bali Tahun 2014 untuk rekomendasi ke tingkat pusat;
- g) Dokumen Perubahan KUA serta PPAS P-APBD Tahun 2014;
- h) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prov Jatim Tahun 2015;

- i) Dokumen RKPD Prov. Jatim Tahun 2015;
- j) Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
- k) Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prop. Jawa Timur Tahun 2015;
- l) Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota Tahun 2014;
- m) Tersedianya sistem informasi penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan P-APBD Tahun 2014 dan APBD 2015;
- n) Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pengolahan data hasil musrenbang provinsi Tahun 2014;
- o) Tersedianya data hasil musrenbang provinsi dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2015;
- p) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Rancangan RPJMD 2014-2019;
- q) Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- r) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2015;
- s) Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2015;
- t) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Tahun 2014;
- u) Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
- v) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
- w) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan P-APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
- x) Konsultasi Rancangan akhir RPJPD dan RPJMD Kab/Kota di Jawa Timur.

2.3.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2015 - 2016

Capaian kinerja pembangunan dan layanan publik Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator-indikator kinerja pada masing-masing program tahun 2015 - 2016 dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 30% dan telah terealisasi sebesar 46,5% sehingga capaiannya adalah sebesar 155% sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 30% terealisasi 42% sehingga capaiannya sebesar 140%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2015 terdiri dari 7 kegiatan sedangkan pada tahun 2016 terdiri dari 8 kegiatan dengan riancian kegiatan diantaranya adalah:

a) Musrenbang Propinsi

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 940.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp 925.561.544 atau 98,38% memiliki target kinerja 5 (lima) kali rapat persiapan termasuk pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi 5 (lima) kali rapat atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp 923.624.000,00 dan realisasi sebesar Rp 854.688.700,00 atau 92,54% memiliki target kinerja 1 (satu) kali rapat pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi 1 (satu) kali rapat atau 100%.

b) Musrenbang Regional

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 119.356.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 78.312.400 atau 65,61% memiliki target kinerja 4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 172.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 165.853.400,00 atau 96,07% memiliki target kinerja 4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%.

c) Musrenbang Nasional

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 591.634.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 550.430.210 atau 93,04 % memiliki target kinerja partisipasi pelaksanaan Pameran Pembangunan Nasional, Kehadiran Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas,

dan Rapat Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%.

- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 414.530.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 351.666.750,00 atau 84,84% memiliki target kinerja jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas, dan Rapat Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%.

d) Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota

- Pada Tahun 2015 dengan anggaran Rp 230.455.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 227.871.867 atau 98,88% memiliki target kinerja 42 (empat puluh dua) rapat untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota dan terealisasi 42 (empat puluh dua) rapat atau 100%.
- Pada Tahun 2016 dengan anggaran Rp 500.690.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 494.120.588,00 atau 98,69% memiliki target kinerja 42 (empat puluh dua) kali rapat untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota dan terealisasi 38 (tiga puluh delapan) rapat atau 90,48%, yang terdiri dari rapat pada pelaksanaan Musrenbang 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

e) Penyusunan RKPD

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 838.876.800,00 Realisasi sebesar Rp. 675.919.780 atau 80,57 %. Dengan target kinerja Jumlah dokumen RKPD yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) rapat dan 4 (empat) konsultasi.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 1.256.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 764.857.460,00 atau 60,87% memiliki target kinerja rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali rapat dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kali rapat atau 100% serta jumlah dokumen sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen RKPD 2017 dan RKPD Perubahan Tahun 2016 atau 100%.

f) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 658.088.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 572.703.950 atau 87,03% memiliki target kinerja 2 (dua) rapat koordinasi dan terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 634.312.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 484.154.231,00 atau 76,33% memiliki target kinerja 2 (dua) kali rapat koordinasi dan terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%.

g) Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 639.475.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 576.287.499 atau 90,12% memiliki target kinerja 2 (dua) sistem informasi yang mendukung pengolahan data P-APBD 2015 dan APBD 2016 dan terealisasi 2 (dua) sistem informasi atau 100%.

h) Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 452.841.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 393.455.650 atau 86,89% memiliki target kinerja jumlah dokumen KUA/PPAS yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 635.641.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 397.956.615,00 atau 62,61% memiliki target kinerja rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan KUA/PPAS Tahun 2017 dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali rapat dan terealisasi sebanyak 2 (dua) kali rapat atau 100% serta jumlah dokumen sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen yang terdiri dari Dokumen KUA/PPAS 2017 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016 atau 100%.

2. Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 46% dan

telah terealisasi sebesar 46% sehingga capaiannya adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 46% terealisasi 55,3% sehingga capaiannya sebesar 140%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2015 – 2016 terdiri dari 7 kegiatan, yaitu:

a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 319.406.000,00 dan realisasi sebesar Rp 311.075.445,00 atau 97,39% memiliki target kinerja Jumlah laporan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 517.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp 502.798.220,00 atau 97,12% memiliki target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Penyusunan Inventarisasi Permasalahan dan Perumusan Isu – Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017.

b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 400.407.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 386.886.900,00 atau 96,62% memiliki target kinerja Jumlah laporan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan dengan anggaran Rp. 385.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 382.765.600,00 atau 99,38% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017.

c) Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 1.117.165.000,00 dan realisasi sebesar Rp 996.888.149,00 atau 89,23% memiliki target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 1.079.911.175,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.017.891.688,00 atau 94,26% memiliki target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%.

d) Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 584.063.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 483.628.662,00 atau 82,80% memiliki target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 396.284.375,00 dan realisasi sebesar Rp. 356.046.224,00 atau 89,85% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan Tahun 2017.

e) Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 427.517.000,00 dan realisasi sebesar Rp 358.281.532,00 atau 83,81% memiliki target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 446.160.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 399.566.717,00 atau 89,56%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100% yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha Tahun 2017.

f) Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 479.842.000,00 dan realisasi sebesar Rp 414.595.360,00 atau 86,40% memiliki target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 385.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 367.114.276,00 atau 95,34% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Tahun 2017.

g) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 2.398.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.339.916.911,00 atau 97,57%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen atau 100%.

- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 2.555.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.540.282.120,00 atau 99,41% memiliki target kinerja 9 (sembilan) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 44,44%. Dokumen tersebut terdiri dari:
 1. Strategi Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Pertanian dalam Mendukung Kedaulatan Pangan di Jawa Timur Tahun 2017
 2. Derivasi Kebijakan Moneter dan Fiskal pada Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017
 3. Penyusunan Kebijakan Skim Pembiayaan UMKM dari Industri Primer di Jawa Timur
 4. Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam Mengakselerasi Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur Tahun 2017 – 2019

3. Capaian Kinerja Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dengan indikator:

- persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 72% dan telah terealisasi sebesar 97,89% sehingga capaiannya adalah sebesar 135,96% sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 72% terealisasi 98% sehingga capaiannya sebesar 136,11%.
- persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 85% dan telah terealisasi sebesar 97,01% sehingga capaiannya adalah sebesar 114,13%, sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 85% terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 117,64%.
- persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 60% dan telah terealisasi sebesar 77,11% sehingga capaiannya adalah sebesar 128,52% sedangkan pada tahun 2016

dengan target sebesar 60% terealisasi 84,51% sehingga capaiannya sebesar 140,85%.

Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2015 terdiri dari 11 kegiatan sedangkan pada tahun 2016 terdiri dari 10 kegiatan dengan riancian kegiatan diantaranya adalah:

a) **Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan**

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 276.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp 255.101.072,00 atau 92,19% memiliki target kinerja jumlah dokumen analisis data hasil pelaksanaan pembangunan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yaitu Buku Saku Pembangunan Jawa Timur Tahun 2015 atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 198.936.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 195.325.381,00 atau 98,19%. Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan.

b) **Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan**

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 1.032.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.944.773.404,00 atau 91,55% memiliki target kinerja jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan sebanyak 5 dokumen, dan terealisasi 5 dokumen yaitu Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Buku Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tahun 2015, Buku Potensi Jawa Timur Tahun 2015, Buku Data Dinamis Semester I dan II Tahun 2015, atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 701.398.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 675.587.383,00 atau 96,32%. Dengan target kinerja 7 (tujuh) dokumen dan terealisasi 7 (tujuh) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Tahun 2016, Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2016, Data Dinamis Triwulanan Tahun 2016, serta Potensi Jawa Timur Tahun 2016

c) Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 525.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 466.887.132,00, atau 88,93% memiliki target kinerja jumlah visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen, yaitu Visualisasi Potensi Poros Maritim Jawa Timur, Visualisasi Hasil Pembangunan Jawa Timur Tahun 2015, Iklan Layanan Masyarakat Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2016, Iklan Layanan Masyarakat Tema UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Provinsi Jawa Timur, Durastrans RKPD Jawa Timur 2016, Durastrans Potensi Maritim Jawa Timur, Booklet Informasi Perencanaan Pembangunan, dan Leaflet Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 300.686.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 294.632.695,00 atau 97,99%. Dengan target kinerja 7 (tujuh) visualisasi data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dan terealisasi 7 (tujuh) visualisasi data/informasi atau 100%.

d) Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 682.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp 596.901.116,00 atau 87,49% memiliki target kinerja jumlah dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan website Bappeda Prov Jatim sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersaji dalam <http://portal.jatimprov.intranet> dan <http://bappeda.jatimprov.go.id> atau 100%
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 848.946.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 805.310.091,00 atau 89,85% memiliki target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim

e) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 726.411.200,00 dan realisasi sebesar Rp 611.568.559,00 atau 84,19% memiliki target kinerja jumlah dokumen LKPJ sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen yaitu Nota penjelasan Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2014, Lampiran LKPJ dan Jawaban Eksekutif atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 733.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 689.350.078,00 atau 93,96% memiliki target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang dilengkapi dengan Lampiran serta Jawaban Eksekutif terhadap LKPJ Gubernur.

f) Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 26.113.000,00 dan realisasi sebesar Rp 19.043.650 atau 72,93% memiliki target kinerja jumlah dokumen yang diklarifikasi sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 2 dokumen rekomendasi Raperda RPJPD Kab Jember dan Kab. Sidoarjo atau 200%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 557.306.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 516.511.284,00 atau 92,68% memiliki target kinerja 19 (sembilan belas) dokumen dan terealisasi 19 (sembilan belas) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Hasil Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota pada 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2016

g) Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 166.543.200,00 dan realisasi sebesar Rp 145.201.461 atau 87,19% memiliki target kinerja jumlah dokumen Reses DPRD Prov. Jatim sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen atau 100%.

h) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 955.029.800,00 dan realisasi sebesar Rp 866.649.465,00 atau 90,75% memiliki target kinerja jumlah dokumen laporan evaluasi hasil Renja SKPD Triwulanan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 680.894.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 580.983.435,00 atau 85,33% memiliki target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD pada Triwulan I, II, III, dan IV

i) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 792.915.200,00 dan realisasi sebesar Rp 687.717.675,00 atau 86,73% memiliki target kinerja jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kab/Kota semesteran sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 708.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 662.426.736,00 atau 93,49% memiliki target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Pengendalian dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.

j) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 2.220.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.989.854.620,00 atau 89,63% memiliki target kinerja jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 2.230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.088.004.621,00 atau 93,63% memiliki target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%.

k) Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 810.157.600,00 dan realisasi sebesar Rp 747.071.753,00 atau 92,21% memiliki target kinerja jumlah

dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan (DK, TP, dan UB), DAK dan hasil verifikasi aksi PPK sebanyak 12 dokumen dan terealisasi 11 dokumen atau 91,67%.

- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 680.894.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 564.903.613,00 atau 87,25% memiliki target kinerja 12 (dua belas) dokumen dan terealisasi 9 (sembilan) dokumen atau 75%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (DK, TP, UB) DAK dan Verifikasi RAD PPK.

4. Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator jumlah kegiatan yang difasilitasi pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 13 kegiatan dan telah terealisasi sebesar 13 kegiatan sehingga capaiannya adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 12 kegiatan dan telah terealisasi sebesar 12 kegiatan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015 terdiri dari 13 kegiatan sedangkan pada tahun 2016 terdiri dari 12 kegiatan dengan rincian kegiatan diantaranya adalah:

a) Pendampingan dan Fasilitasi Prog. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 506.378.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 452.616.676,00 atau 89,38% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pemutahiran strategi sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dokumen Pelaksanaan yang tersusun terdiri dari kegiatan kick off program PPSP tahun 2015, pra lokakarya strategi sanitasi kabupaten/kota serta lokakarya strategi sanitasi kabupaten/kota.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 448.120.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 446.954.355,00 atau 99,74% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen

laporan pelaksanaan Program PPSP di Jawa Timur yang terdiri dari kegiatan Kick Off Program PPSP Tahun 2016, Penjaminan Kualitas, Pra Lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, serta Lokakarya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.

b) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 324.170.000,00 dan realisasi sebesar Rp 197.956.600,00 atau 61,07% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan perkuatan kelembagaan pengelolaan SDA di Jawa Timur yang terdiri dari peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA, pelatihan TPM/KTPM, penyusunan Interim Financial Report (IFR) dan penyusunan program kerja terpadu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI).
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 175.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 174.716.240,00 atau 99,36% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan pembinaan perkuatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air Jawa Timur yang terdiri dari kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA dan Pelatihan TPM/KTPM.

c) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 410.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp 363.548.555,00 atau 88,54% memiliki target kinerja jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 355.582.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 326.752.753,00 atau 91,89% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

d) Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 351.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 309.482.444,00 atau 88,07% memiliki target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.

- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 272.142.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 263.929.031,00 atau 96,98% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

e) Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 511.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 418.497.304,00 atau 81,83% memiliki target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 329.699.050,00 dan realisasi sebesar Rp. 294.894.050,00 atau 89,44% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

f) Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 212.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 183.320.828,00 atau 86,47% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.

g) Fasilitas Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 172.660.000,00 dan realisasi sebesar Rp 155.038.370,00 atau 89,79% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 135.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 90.149.300,00 atau 66,48% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

h) Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 1.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.065.607.116,00 atau 92,66% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 486.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 444.680.180,00 atau 91,42% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

i) Koordinasi dan Fasilitas Percepatan PUG dan Perlindungan Anak

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 570.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 534.604.510,00 atau 93,79% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
 - Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 410.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 376.571.404,00 atau 91,85% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
- j) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 170.554.000,00 dan realisasi sebesar Rp 160.762.650,00 atau 94,26% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%.
 - Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 292.268.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 278.555.794,00 atau 95,31% memiliki target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 50%.
- k) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan
- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 861.012.000,00 dan realisasi sebesar Rp 759.804.350,00 atau 88,25% memiliki target kinerja jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
 - Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 834.835.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 818.828.550,00 atau 98,08% dan memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.
- l) Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 1.985.532.500,00 Realisasi sebesar Rp 1.770.584.263,00 atau 89,17% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini memfasilitasi percepatan pembangunan JLS, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-II) dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).

- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 1.198.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 1.189.714.745,00 atau 99,24% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan yang terdiri dari dukungan terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Water Resources dan Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-II) dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

m) Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 712.184.000,00 dan realisasi sebesar Rp 660.481.820,00 atau 92,74% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 532.870.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 516.507.386,00 atau 96,93% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.

5. Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 32% dan telah terealisasi sebesar 32% sehingga capaiannya adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 32% dan telah terealisasi sebesar 32% sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Tahun 2015 – 2016 terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 2.669.738.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.568.291.948,00 atau 96,20% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 2.526.404.340,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.510.979.585,00 atau 99,39% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

b) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 253.665.000,00 dan realisasi sebesar Rp 242.672.750,00 atau 95,67% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan infrastruktur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 125.157.840,00 dan realisasi sebesar Rp. 124.810.840,00 atau 99,72% Dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen laporan pelaksanaan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur.

c) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 278.425.000,00 dan realisasi sebesar Rp 246.567.875,00 atau 88,56% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan strategi program pembangunan infrastruktur Jawa Timur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 98.337.820,00 dan realisasi sebesar Rp. 98.090.820,00 atau 99,75% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu dokumen

laporan pelaksanaan Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 3.186.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp 3.082.665.245,00 atau 96,73% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 9 dokumen dan terealisasi 9 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi sebagai bahan masukan dalam perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 3.235.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.171.816.400,00 atau 98,04% memiliki target kinerja 6 (enam) dokumen dan terealisasi 6 (enam) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari:
 1. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dalam Pembentukan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Jawa Timur
 2. Penyusunan Strategi Pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) 2030 (100-0-100) di Jawa Timur
 3. Penyusunan Strategi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat dalam rangka Meningkatkan Performance Logistic di Jawa Timur
 4. Penyusunan Evaluasi Kinerja Infrastruktur Perhubungan di Jawa Timur
 5. Penyusunan Kajian Kesiapan Insfrastruktur Prasarana Perhubungan sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
 6. Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan TPA Regional di Jawa Timur

6. Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

Capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan dengan indikator persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitas keuangan daerah dalam dokumen perencanaan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 95% sehingga capaiannya adalah sebesar 95% sedangkan pada tahun 2016 dengan

target sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 99% sehingga capaiannya adalah sebesar 99%. Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2015 - 2016 terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 3.459.188.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.818.148.394,00 atau 81,47% memiliki target kinerja jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 2.581.965.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.386.372.888,00 atau 92,42% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan.

b) Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp. 1.854.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.854.800.000,00 atau 100% memiliki target kinerja jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 3.483.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.474.378.200,00 atau 99,752% memiliki target kinerja 9 (sembilan) dokumen dan terealisasi 9 (sembilan) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari :
 1. Strategi Model Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Penyusunan Data Base Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Jatim
 2. Analisis Sumber Pembiayaan Pembangunan melalui Obligasi Daerah
 3. Penyusunan Strategi Perencanaan bersumber dari CSR/PKBL di Jawa Timur
 4. Percepatan Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 5. Legal Aspek Kerjasama antara BLUD dan Pihak Ketiga

6. Sinergitas Program Kemitraan Lembaga Non Pemerintah dengan Pemerintah Jawa Timur dalam upaya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan
7. Strategi Model Penguatan Lembaga Forum CSR
8. Proses Politik dalam Penetapan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
9. Pengembangan Pembiayaan UPT Rumah Sakit Kusta Kediri Menjadi Rumah Sakit Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

7. Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional dengan indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 28% dan telah terealisasi sebesar 28% sehingga capaiannya adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 28% dan telah terealisasi sebesar 28% sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional Tahun 2015 – 2016 terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 40.215.000,00 dan realisasi sebesar Rp 38.736.250,00 atau 96,32% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 91.820.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 91.674.808,00 atau 99,84% memiliki target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Dokumen Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Program Pembangunan Penataan Ruang

b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 77.110.000,00 dan realisasi sebesar Rp 76.022.950,00 atau 98,59% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 77.772.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 75.961.445,00 atau 97,67% memiliki target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari 2 (dua) Dokumen Penyusunan Strategi dan Kebijakan Program Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta 2 (dua) Dokumen Penyusunan Kebijakan Program Pembangunan Penataan Ruang.

c) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 4.041.115.000,00 dan realisasi sebesar Rp 3.905.106.860,00 atau 96,63%. Dengan indikator kinerja:
 - Jumlah koordinasi sebanyak 38 kali dan terealisasi 35 kali atau 92%.
 - Jumlah rapat sebanyak 9 kali dan terealisasi 9 kali atau 100%
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 4.117.685.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.093.526.555,00 atau 99,41%. Dengan target kinerja :
 - Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota 38 kali dan terealisasi 38 kali atau 100%,
 - Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA LH 9 (sembilan) kali dan terealisasi 9 (sembilan) kali atau 100% dengan pokok bahasan terkait data pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang yang didalamnya memuat tentang perencanaan dan kelembagaan serta sistem informasi.

d) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 2.912.060.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.909.819.100,00 atau 99,92% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 4.594.941.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.579.144.400,00 atau 99,66% memiliki target kinerja 8 (delapan) dokumen dan terealisasi 13 (tiga belas) dokumen atau 162,5%. Dokumen tersebut terdiri dari:
 1. Kajian Penurunan Tanah terhadap kegiatan pengeboran minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya Kabupaten Sidoarjo
 2. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya, Kabupaten Sidoarjo
 3. Analisis Resiko Terhadap Kegiatan Pengeboran Sumur Minyak dan Gas Bumi di Kawasan Tanggulangin dan Sekitarnya
 4. Pemaduserasian Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Bentuk Insentif dan Disinsentif
 5. Sinkronisasi Kebijakan RTRW Provinsi dengan Kebijakan Nasional
 6. Analisa Resiko dan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Sungai Madura berdasarkan pada Karakteristik Kondisi Fisik dan Wilayah
 7. KLHS Kawasan Agropolitan Ijen (Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember)
 8. Rencana Pengembangan Investasi Klaster Industri di Wilayah Pantura Jawa Timur
 9. Pengurangan Disparitas Wilayah Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah
 10. Rencana Pengembangan Aksesibilitas Transportasi Darat di Malang Raya
 11. Penyusunan Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
 12. Pengembangan Potensi Energi Listrik dan Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Pengelolaan Limbah Provinsi Jawa Timur

8. Capaian Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan dengan indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 20% dan telah terealisasi sebesar 20% sehingga capaiannya adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2016 dengan target sebesar 20% dan telah terealisasi sebesar 20% sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan Tahun 2015 - 2016 terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a) Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
 - Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 556.510.562,00 atau 69,56% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
 - Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 2.104.113.100,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.018.529.746,00 atau 95,93% memiliki target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%, yaitu Dokumen Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
- b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
 - Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 1.267.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.089.727.995,00 atau 85,97% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.

- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 876.358.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 727.257.853,00 atau 89,99% memiliki target kinerja 2 (dua) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau 50%.
- c) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 950.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 769.344.592,00 atau 80,98% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%
 - Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 260.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 255.173.316,00 atau 98,14% memiliki target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%.
- d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 496.155.000,00 atau 49,62% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%.
 - Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 1.325.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.237.060.787,00 atau 93,36% memiliki target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari:
 1. Penyusunan Analisis Kependudukan Sebagai Instrumen dalam Perencanaan Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan di Jawa Timur
 2. Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Sebagai Implementasi Revolusi Mental di Jawa Timur
 3. Penyusunan Analisis Implementasi Model Pengukuran Kinerja Pendukung Kesalehan Sosial
 4. Laporan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Pemerintah Prov. Jatim Tahun 2015

e) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

- Pada tahun 2015 dengan anggaran Rp 994.116.000,00 dan realisasi sebesar Rp 804.453.679,00 atau 80,92% memiliki target kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.
- Pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 459.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 404.727.666,00 atau 88,10% memiliki target kinerja 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen atau 100%.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2016 berdasarkan indikator kinerja sasaran atau yang program telah ditetapkan tertera pada Tabel 2.13. Berdasarkan Tabel 2.13 diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran dan program tahun 2015 – 2016 memiliki nilai positif karena telah tercapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan dan hanya 1 (satu) indikator kinerja program yang belum mencapai target, yaitu persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitas keuangan daerah dalam dokumen perencanaan sebesar 99% dari target 100% namun capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 95%.

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur selain ditunjukkan melalui capaian kinerja sasaran dan program yang sesuai dengan target juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan, melalui realisasi anggaran sesuai pagu yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2016. Berdasarkan Tabel 2.14 dapat diketahui bahwa rasio antara anggaran dengan realisasi pada tahun 2016 (93,59%) lebih tinggi atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 (91,57%). Hal tersebut selaras dengan capaian kinerja sasaran dan program tahun 2016 yang juga menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun 2015. Secara khusus belanja langsung daerah sebagaimana tertera pada Tabel 2.14 dan 2.15 yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan rasio realisasi dibandingkan tahun 2015 dengan capaian realisasi tertinggi pada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa pada belanja langsung mengalami peningkatan presentase pada anggaran belanja langsung yang dari 63% pada tahun 2015 menjadi 69% pada tahun 2016.

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2016

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realiasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
						2015	2016	2015	2016	2015	2016
A	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase usulan stakeholder yang terakomodir didalam dokumen perencanaan				30,00%	30,00%	46,50%	42,00%	155,00%	140,00%
		Persentase ketaatan terhadap tata ruang				70,00%	70,00%	75,32%	75,00%	107,60%	107,14%
1	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan				30,00%	30,00%	46,50%	42,00%	155,00%	140,00%
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan				46,00%	46,00%	46,00%	55,30%	100,00%	120,22%
3	Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan yang difasilitasi				13	12	13	12	100,00%	100,00%
4	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan				32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	100,00%	100,00%

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realiasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
						2015	2016	2015	2016	2015	2016
5	Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitas keuangan daerah dalam dokumen perencanaan				100,00%	100,00%	95,00%	99,00%	95,00%	99,00%
6	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan				28,00%	28,00%	28,00%	28,00%	100,00%	100,00%
7	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%
B	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan				95,00%	95,00%	98,62%	100,00%	103,81%	105,26%
		Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %				85,00%	85,00%	87,50%	88,17%	102,94%	103,73%

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realiasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun Ke-	
						2015	2016	2015	2016	2015	2016
	akurat dan tepat waktu	Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan				80,00%	85,00%	100,00%	100,00%	125,00%	117,65%
		Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik				-	80,00%	-	100,00%	-	125,00%
1	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan				72,00%	72,00%	97,89%	98,00%	135,96%	136,11%
		Persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD				85,00%	85,00%	97,01%	100,00%	114,13%	117,65%
		Persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/ kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu				60,00%	60,00%	77,11%	84,51%	128,52%	140,85%

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA DAERAH	94.005.750.500	97.904.345.000	86.085.648.283	91.632.873.115	91,57%	93,59%	1.949.297.250	2.773.612.416
BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.054.253.000	24.003.500.000	14.179.227.066	21.999.969.528	94,19%	91,65%	4.474.623.500	3.910.371.231
BELANJA PEGAWAI	15.054.253.000	24.003.500.000	14.179.227.066	21.999.969.528	94,19%	91,65%	4.474.623.500	3.910.371.231
BELANJA LANGSUNG	78.951.497.500	73.900.845.000	71.906.421.217	69.632.903.587	91,08%	94,22%	(2.525.326.250)	(1.136.758.815)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA PEGAWAI	25.232.710.000	21.363.038.000	22.985.005.999	19.653.994.000	91,09%	92,00%	(1.934.836.000)	(1.665.506.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	50.322.935.500	50.650.458.000	45.651.347.012	48.111.407.677	90,72%	94,99%	163.761.250	1.230.030.333
BELANJA MODAL	3.395.852.000	2.022.949.000	3.270.068.206	1.957.651.210	96,30%	96,77%	(686.451.500)	(656.208.498)

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA LANGSUNG	78.951.497.500	73.900.845.000	71.906.421.217	69.632.903.587	91,08%	94,22%	(2.525.326.250)	(1.136.758.815)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>								
BELANJA PEGAWAI	4.278.348.000	4.680.780.000	4.186.384.000	4.503.685.000	97,85%	96,22%	201.216.000	158.650.500
BELANJA BARANG DAN JASA	2.159.768.700	1.052.342.111	1.976.984.471	941.861.899	91,54%	89,50%	(553.713.295)	(517.561.286)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>								
BELANJA PEGAWAI	9.900.000	12.150.000	6.000.000	12.150.000	60,61%	100,00%	1.125.000	3.075.000
BELANJA BARANG DAN JASA	2.813.082.000	2.734.737.000	2.746.845.539	2.590.770.763	97,65%	94,74%	(39.172.500)	(78.037.388)
BELANJA MODAL	2.318.462.000	924.648.000	2.240.398.050	910.173.000	96,63%	98,43%	(696.907.000)	(665.112.525)
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>								
BELANJA PEGAWAI	148.320.000	178.260.000	136.755.000	173.150.000	92,20%	97,13%	14.970.000	18.197.500
BELANJA BARANG DAN JASA	3.992.399.000	3.996.058.489	3.891.978.862	3.933.458.966	97,48%	98,43%	1.829.745	20.740.052
BELANJA MODAL		48.468.500		47.549.150		98,10%	24.234.250	23.774.575
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>								
BELANJA PEGAWAI	623.660.000	349.000.000	557.420.000	349.000.000	89,38%	100,00%	(137.330.000)	(104.210.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	1.438.962.000	1.428.366.000	1.161.662.548	1.218.785.235	80,73%	85,33%	(5.298.000)	28.561.344
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>								
BELANJA PEGAWAI	307.350.000	217.710.000	206.690.000	173.170.000	67,25%	79,54%	(44.820.000)	(16.760.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	2.059.110.000	1.531.683.000	1.881.323.742	1.489.156.468	91,37%	97,22%	(263.713.500)	(196.083.637)
<i>Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)</i>								
BELANJA PEGAWAI	2.279.440.000	1.966.200.000	2.106.215.000	1.879.270.000	92,40%	95,58%	(156.620.000)	(113.472.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	2.433.670.000	2.039.425.000	2.156.820.254	1.822.014.637	88,62%	89,34%	(197.122.500)	(167.402.809)
BELANJA MODAL	36.890.000	56.375.000	36.124.000	51.422.800	97,92%	91,22%	9.742.500	7.649.400
<i>Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional</i>								
BELANJA PEGAWAI	9.120.000		9.120.000		100,00%		(4.560.000)	(4.560.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	2.479.880.000	1.959.500.000	2.252.269.674	1.902.291.116	90,82%	97,08%	(260.190.000)	(174.989.279)
BELANJA MODAL	11.000.000	40.500.000	9.966.000	40.185.200	90,60%	99,22%	14.750.000	15.109.600
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan								
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>								
BELANJA PEGAWAI	160.300.000	282.742.000	123.630.000	257.318.000	77,12%	91,01%	61.221.000	66.844.000
BELANJA BARANG DAN JASA	47.082.500	413.299.000	25.467.700	338.564.450	54,09%	81,92%	183.108.250	156.548.375
<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>								
BELANJA PEGAWAI	345.640.000	339.620.000	284.616.000	136.425.000	82,34%	40,17%	(3.010.000)	(74.095.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	535.214.000	78.170.000	482.088.425	8.224.900	90,07%	10,52%	(228.522.000)	(236.931.763)
<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA BARANG DAN JASA	280.000.000	230.000.000	264.247.500	229.720.000	94,37%	99,88%	(25.000.000)	(17.263.750)
BELANJA MODAL	50.000.000		49.500.000		99,00%		(25.000.000)	(24.750.000)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
<i>Musrenbang Propinsi</i>								
BELANJA PEGAWAI	200.170.000	98.146.000	198.481.000	86.373.000		88,00%	(51.012.000)	(56.054.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	740.630.000	825.478.000	727.080.544	768.315.700		93,08%	42.424.000	20.617.578
<i>Musrenbang Regional</i>								
BELANJA PEGAWAI	27.990.000	0	0			0,00%	(13.995.000)	
BELANJA BARANG DAN JASA	91.366.000	172.640.000	78.312.400	165.853.400	85,71%	96,07%	40.637.000	43.770.500
<i>Musrenbang Nasional</i>								
BELANJA PEGAWAI	90.005.000	72.925.000	88.258.000	37.820.000		51,86%	(8.540.000)	(25.219.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	501.629.500	341.605.000	462.172.210	313.846.750		91,87%	(80.012.250)	(74.162.730)
<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>								
BELANJA PEGAWAI	27.940.000	14.740.000	26.330.000	11.400.000		77,34%	(6.600.000)	(7.465.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	202.515.000	485.950.000	201.541.867	482.720.588		99,34%	141.717.500	140.589.361
<i>Penyusunan RKPD</i>								
BELANJA PEGAWAI	501.522.000	863.965.000	470.026.000	555.231.000		64,27%	181.221.500	42.602.500
BELANJA BARANG DAN JASA	337.354.800	392.485.000	205.893.780	209.626.460		53,41%	27.565.100	1.866.340
<i>Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	176.740.000	151.710.000	162.781.000	85.432.000		56,31%	(12.515.000)	(38.674.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	481.348.000	482.602.000	409.922.950	398.722.231		82,62%	627.000	(5.600.360)
<i>Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran</i>								
BELANJA PEGAWAI	70.200.000		41.400.000		58,97%		(35.100.000)	(20.700.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	569.275.000		534.887.499		93,96%		(284.637.500)	(267.443.750)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	282.410.000	266.150.000	239.992.000	135.240.000	84,98%	50,81%	(8.130.000)	(52.376.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	170.431.000	369.491.000	153.463.650	262.716.615	90,04%	71,10%	99.530.000	54.626.483
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
<i>Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	197.504.000	142.290.000	193.661.000	139.425.000		97,99%	(27.607.000)	(27.118.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	121.902.000	360.410.000	117.414.445	351.823.220		97,62%	119.254.000	117.204.388
BELANJA MODAL		15.000.000		11.550.000		77,00%	7.500.000	5.775.000
<i>Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	297.083.000	243.240.000	288.193.500	243.023.000	97,01%	99,91%	(26.921.500)	(22.585.250)
BELANJA BARANG DAN JASA	103.324.000	141.910.000	98.693.400	139.742.600	95,52%	98,47%	19.293.000	20.524.600
<i>Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro</i>								
BELANJA PEGAWAI	401.428.000	238.320.000	355.881.000	208.076.000	88,65%	87,31%	(81.554.000)	(73.902.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	690.737.000	659.091.175	618.881.399	631.005.188	89,60%	95,74%	(15.822.913)	6.061.895
BELANJA MODAL	25.000.000	182.500.000	22.125.750	178.810.500	88,50%	97,98%	78.750.000	78.342.375
<i>Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan</i>								
BELANJA PEGAWAI	430.042.000	273.980.000	355.908.999	254.083.000	82,76%	92,74%	(78.031.000)	(50.913.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	144.021.000	122.304.375	117.819.663	101.963.224	81,81%	83,37%	(10.858.313)	(7.928.220)
BELANJA MODAL	10.000.000		9.900.000		99,00%		(5.000.000)	(4.950.000)
<i>Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha</i>								
BELANJA PEGAWAI	285.658.000	302.050.000	245.423.000	280.455.000	85,91%	92,85%	8.196.000	17.516.000
BELANJA BARANG DAN JASA	111.859.000	116.610.000	83.114.532	92.931.717	74,30%	79,69%	2.375.500	4.908.593
BELANJA MODAL	30.000.000	27.500.000	29.744.000	26.180.000	99,15%	95,20%	(1.250.000)	(1.782.000)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM</i>								
BELANJA PEGAWAI	358.688.000	262.500.000	309.036.000	251.285.000	86,16%	95,73%	(48.094.000)	(28.875.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	121.154.000	114.570.000	105.559.360	108.891.776	87,13%	95,04%	(3.292.000)	1.666.208
BELANJA MODAL		8.000.000		6.937.500		86,72%	4.000.000	3.468.750
<i>Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i>								
BELANJA PEGAWAI	158.200.000	175.300.000	143.700.000	175.200.000	90,83%	99,94%	8.550.000	15.750.000
BELANJA BARANG DAN JASA	2.240.000.000	2.380.000.000	2.196.216.911	2.365.082.120	98,05%	99,37%	70.000.000	84.432.605
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan								
<i>Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan</i>								
BELANJA PEGAWAI	166.080.000	122.196.000	157.354.000	119.783.000	94,75%	98,03%	(21.942.000)	(18.785.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	110.640.000	76.740.000	97.747.072	75.542.381	88,35%	98,44%	(16.950.000)	(11.102.346)
<i>Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan</i>								
BELANJA PEGAWAI	469.392.000	313.248.000	450.130.000	298.278.000	95,90%	95,22%	(78.072.000)	(75.926.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	486.608.000	386.150.000	420.272.404	375.367.883	86,37%	97,21%	(50.229.000)	(22.452.261)
BELANJA MODAL	76.000.000	2.000.000	74.371.000	1.941.500	97,86%	97,08%	(37.000.000)	(36.214.750)
<i>Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan</i>								
BELANJA PEGAWAI	156.972.000	94.382.000	129.663.000	94.134.000	82,60%	99,74%	(31.295.000)	(17.764.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	368.028.000	206.304.000	337.224.132	200.498.695	0,9163002	97,19%	(80.862.000)	(68.362.719)
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan</i>								
BELANJA PEGAWAI	290.452.000	363.821.000	274.019.000	351.320.000	94,34%	96,56%	36.684.500	38.650.500
BELANJA BARANG DAN JASA	322.408.000	135.125.500	257.360.616	128.830.091	79,82%	95,34%	(93.641.250)	(64.265.263)
BELANJA MODAL	69.400.000	350.000.000	65.521.500	325.160.000	94,41%	92,90%	140.300.000	129.819.250
<i>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)</i>								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Gubernur Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	309.332.000	349.311.000	249.782.000	317.591.000	80,75%	90,92%	19.989.500	33.904.500
BELANJA BARANG DAN JASA	417.079.200	384.369.000	361.786.559	371.759.078	86,74%	96,72%	(16.355.100)	4.986.260
<i>Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota</i>								
BELANJA PEGAWAI	4.280.000	268.902.000	-	243.420.000	0,00%	90,52%	132.311.000	121.710.000
BELANJA BARANG DAN JASA	21.833.000	288.404.500	19.043.650	273.091.284	87,22%	94,69%	133.285.750	127.023.817
<i>Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	89.215.000		86.558.500		97,02%		(44.607.500)	(43.279.250)
BELANJA BARANG DAN JASA	77.328.200		58.642.961		75,84%		(38.664.100)	(29.321.481)
<i>Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi</i>								
BELANJA PEGAWAI	374.861.000	349.501.000	365.106.000	282.034.000	97,40%	80,70%	(12.680.000)	(41.536.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	412.968.800	316.393.000	336.443.805	284.099.435	81,47%	89,79%	(48.287.900)	(26.172.185)
BELANJA MODAL	167.200.000	15.000.000	165.099.660	14.850.000	98,74%	99,00%	(76.100.000)	(75.124.830)
<i>Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota</i>								
BELANJA PEGAWAI	301.284.000	255.074.000	284.429.000	247.531.000	94,41%	97,04%	(23.105.000)	(18.449.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	461.131.200	438.506.000	373.038.675	400.045.736	80,90%	91,23%	(11.312.600)	13.503.531
BELANJA MODAL	30.500.000	15.000.000	30.250.000	14.850.000	99,18%	99,00%	(7.750.000)	(7.700.000)
<i>Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan</i>								
BELANJA PEGAWAI	66.900.000	27.600.000	56.500.000	27.000.000	84,45%	97,83%	(19.650.000)	(14.750.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	2.153.100.000	2.202.400.000	1.933.354.620	2.061.004.621	89,79%	93,58%	24.650.000	63.825.001
<i>Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan</i>								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA PEGAWAI	328.064.000	320.964.000	305.754.000	255.925.000	93,20%	79,74%	(3.550.000)	(24.914.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	388.893.600	326.453.000	352.961.507	308.978.613	90,76%	94,65%	(31.220.300)	(21.991.447)
BELANJA MODAL	93.200.000		88.356.246		94,80%		(46.600.000)	(44.178.123)
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah								
<i>Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)</i>								
BELANJA PEGAWAI	191.690.000	114.820.000	188.230.000	114.720.000	98,20%	99,91%	(38.435.000)	(36.755.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	314.688.000	333.300.000	264.386.676	332.234.355	84,02%	99,68%	9.306.000	33.923.840
<i>Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)</i>								
BELANJA PEGAWAI	24.560.000		24.560.000		100,00%		(12.280.000)	(12.280.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	299.610.000	175.850.000	173.396.600	174.716.240	57,87%	99,36%	(61.880.000)	659.820
<i>Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	67.600.000	74.640.000	66.000.000	74.640.000	97,63%	100,00%	3.520.000	4.320.000
BELANJA BARANG DAN JASA	338.000.000	280.942.800	293.011.055	252.112.753	86,69%	89,74%	(28.528.600)	(20.449.151)
BELANJA MODAL	5.000.000		4.537.500		90,75%		(2.500.000)	(2.268.750)
<i>Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)</i>								
BELANJA PEGAWAI	70.540.000	65.600.000	68.940.000	64.440.000	97,73%	98,23%	(2.470.000)	(2.250.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	280.860.000	206.542.600	240.542.444	199.489.031	85,64%	96,58%	(37.158.700)	(20.526.707)
<i>Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)</i>								
BELANJA PEGAWAI	110.680.000	104.720.000	104.280.000	104.320.000	94,22%	99,62%	(2.980.000)	20.000
BELANJA BARANG DAN JASA	400.720.000	224.979.050	314.217.304	190.574.050	78,41%	84,71%	(87.870.475)	(61.821.627)
<i>Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)</i>								
BELANJA PEGAWAI	96.460.000	39.280.000	91.715.000	24.400.000	95,08%	62,12%	(28.590.000)	(33.657.500)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA BARANG DAN JASA	115.540.000	96.320.000	91.605.828	65.749.300	79,28%	68,26%	(9.610.000)	(12.928.264)
<i>Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya</i>								
BELANJA PEGAWAI	13.110.000	39.280.000	8.540.000	24.400.000	65,14%	62,12%	13.085.000	7.930.000
BELANJA BARANG DAN JASA	149.550.000	96.320.000	136.543.370	65.749.300	91,30%	68,26%	(26.615.000)	(35.397.035)
BELANJA MODAL	10.000.000		9.955.000				(5.000.000)	(4.977.500)
<i>Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs</i>								
BELANJA PEGAWAI	263.430.000	87.620.000	255.190.000	74.190.000	96,87%	84,67%	(87.905.000)	(90.500.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	876.570.000	368.780.000	800.462.116	341.362.180	91,32%	92,57%	(253.895.000)	(229.549.968)
BELANJA MODAL	10.000.000	30.000.000	9.955.000	29.128.000	99,55%	97,09%	10.000.000	9.586.500
<i>Percepatan PUG dan Perlindungan Anak</i>								
BELANJA PEGAWAI	219.990.000	82.500.000	215.900.000	77.055.000	98,14%	93,40%	(68.745.000)	(69.422.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	309.010.000	303.500.000	279.962.510	277.296.404	90,60%	91,37%	(2.755.000)	(1.333.053)
BELANJA MODAL	41.000.000	24.000.000	38.742.000	22.220.000	94,49%	92,58%	(8.500.000)	(8.261.000)
<i>Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)</i>								
BELANJA PEGAWAI	17.240.000	19.080.000	12.735.000	12.040.000	73,87%	63,10%	920.000	(347.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	153.314.000	273.188.000	148.027.650	266.515.794	96,55%	97,56%	59.937.000	59.244.072
<i>Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan</i>								
BELANJA PEGAWAI	153.420.000	71.840.000	145.780.000	71.600.000	95,02%	99,67%	(40.790.000)	(37.090.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	682.592.000	762.995.000	589.824.350	747.228.550	86,41%	97,93%	40.201.500	78.702.100
BELANJA MODAL	25.000.000		24.200.000				(12.500.000)	(12.100.000)
<i>Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	1.156.168.000	708.390.000	1.140.942.000	699.975.000	98,68%	98,81%	(223.889.000)	(220.483.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	819.864.500	484.490.000	621.227.263	483.743.645	75,77%	99,85%	(167.687.250)	(68.741.809)
BELANJA MODAL	9.500.000	6.000.000	8.415.000	5.996.100	88,58%	99,94%	(1.750.000)	(1.209.450)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	157.340.000	99.150.000	156.605.000	96.755.000	99,53%	97,58%	(29.095.000)	(29.925.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	499.844.000	433.720.000	463.946.820	419.752.386	92,82%	96,78%	(33.062.000)	(22.097.217)
BELANJA MODAL	55.000.000		39.930.000		72,60%		(27.500.000)	(19.965.000)
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah								
<i>Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</i>								
BELANJA PEGAWAI	1.122.800.000	939.390.000	1.088.693.000	935.325.000	96,96%	99,57%	(91.705.000)	(76.684.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	1.541.938.500	1.569.514.340	1.475.968.948	1.558.382.605	95,72%	99,29%	13.787.920	41.206.829
BELANJA MODAL	5.000.000	17.500.000	3.630.000	17.271.980	72,60%	98,70%	6.250.000	6.820.990
<i>Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	191.310.000	74.743.000	181.842.000	74.567.000	95,05%	99,76%	(58.283.500)	(53.637.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	62.355.000	50.414.840	60.830.750	50.243.840	97,56%	99,66%	(5.970.080)	(5.293.455)
<i>Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur</i>								
BELANJA PEGAWAI	217.608.000	65.268.000	192.286.000	65.081.000	88,36%	99,71%	(76.170.000)	(63.602.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	60.817.000	33.069.820	54.281.875	33.009.820	89,25%	99,82%	(13.873.590)	(10.636.028)
<i>Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</i>								
BELANJA PEGAWAI	161.000.000	185.100.000	149.200.000	185.100.000	92,67%	100,00%	12.050.000	17.950.000
BELANJA BARANG DAN JASA	3.025.800.000	3.050.000.000	2.933.465.245	2.986.716.400	96,95%	97,93%	12.100.000	26.625.578
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan								
<i>Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan</i>								
BELANJA PEGAWAI	1.489.140.000	1.086.280.000	1.105.939.000	1.054.666.000	74,27%	97,09%	(201.430.000)	(25.636.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	1.889.048.000	1.472.685.000	1.633.520.894	1.308.991.888	86,47%	88,88%	(208.181.500)	(162.264.503)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA MODAL	81.000.000	23.000.000	78.688.500	22.715.000	97,15%	98,76%	(29.000.000)	(27.986.750)
<i>Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan</i>								
BELANJA PEGAWAI	104.800.000	133.200.000	104.800.000	133.200.000	100,00%	100,00%	14.200.000	14.200.000
BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000.000	3.350.000.000	1.750.000.000	3.341.178.200	100,00%	99,74%	800.000.000	795.589.100
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional								
<i>Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional</i>								
BELANJA PEGAWAI	14.280.000	13.480.000	13.840.000	13.480.000	96,92%	100,00%	(400.000)	(180.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	25.935.000	78.340.000	24.896.250	78.194.808	95,99%	99,81%	26.202.500	26.649.279
<i>Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional</i>								
BELANJA PEGAWAI	6.040.000	13.080.000	5.800.000	12.800.000	96,03%	97,86%	3.520.000	3.500.000
BELANJA BARANG DAN JASA	71.070.000	64.692.500	70.222.950	63.161.445	98,81%	97,63%	(3.188.750)	(3.530.753)
<i>Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH</i>								
BELANJA PEGAWAI	2.471.258.000	1.658.900.000	2.346.157.000	1.653.808.000	94,94%	99,69%	(406.179.000)	(346.174.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	1.435.357.000	2.304.828.000	1.425.189.860	2.286.404.075	99,29%	99,20%	434.735.500	430.607.108
BELANJA MODAL	134.500.000	153.957.500	133.760.000	153.314.480	99,45%	99,58%	9.728.750	9.777.240
<i>Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH</i>								
BELANJA PEGAWAI	217.700.000	321.000.000	217.620.000	306.900.000	99,96%	95,61%	51.650.000	44.640.000
BELANJA BARANG DAN JASA	2.694.360.000	4.273.941.900	2.692.199.100	4.272.244.400	99,92%	99,96%	789.790.950	790.022.650
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan								

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Rata-rata Pertumbuhan (Rp.Jutaan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat</i>								
BELANJA PEGAWAI	563.060.000	1.248.560.000	412.370.000	1.195.230.000	73,24%	95,73%	342.750.000	391.430.000
BELANJA BARANG DAN JASA	220.940.000	829.553.100	130.170.562	797.900.746	58,92%	96,18%	304.306.550	333.865.092
BELANJA MODAL	16.000.000	26.000.000	13.970.000	25.399.000	87,31%	97,69%	5.000.000	5.714.500
<i>Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur</i>								
BELANJA PEGAWAI	577.288.000	261.360.000	514.460.000	173.875.000	89,12%	66,53%	(157.964.000)	(170.292.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	604.012.000	599.998.900	492.338.995	538.862.853	81,51%	89,81%	(2.006.550)	23.261.929
BELANJA MODAL	86.200.000	15.000.000	82.929.000	14.520.000	96,21%	96,80%	(35.600.000)	(34.204.500)
<i>Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Masyarakat</i>								
BELANJA PEGAWAI	629.300.000	41.500.000	497.920.000	41.240.000	79,12%	99,37%	(293.900.000)	(228.340.000)
BELANJA BARANG DAN JASA	320.700.000	218.500.000	271.424.592	213.933.316	84,64%	97,91%	(51.100.000)	(28.745.638)
<i>Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat</i>								
BELANJA PEGAWAI	63.200.000	100.800.000	28.200.000	73.700.000	44,62%	73,12%	18.800.000	22.750.000
BELANJA BARANG DAN JASA	936.800.000	1.224.200.000	467.955.000	1.163.360.787	49,95%	95,03%	143.700.000	347.702.894
<i>Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat</i>								
BELANJA PEGAWAI	637.208.000	116.680.000	551.265.000	112.260.000	86,51%	96,21%	(260.264.000)	(219.502.500)
BELANJA BARANG DAN JASA	356.908.000	300.220.000	253.188.679	254.990.666	70,94%	84,93%	(28.344.000)	900.994
BELANJA MODAL		42.500.000		37.477.000		88,18%	21.250.000	18.738.500
	78.951.497.500	74.036.445.000	71.906.421.217	69.723.052.887	91,08%	94,17%	(2.457.526.250)	(1.091.684.165)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur selama 2009 – 2016 menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur namun jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Selain hal tersebut, tantangan lain yang dihadapi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya partisipasi dan peran masyarakat pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrenbang Provinsi dengan pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;
3. Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM Perencana yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur baik dikarenakan promosi ke PD lain dan belum maksimalnya pengkaderan SDM di unit Bappeda;
4. Adanya berbagai Regulasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Masih terdapatnya ketidak selarasan kebijakan antar Lembaga dipemerintah Pusat;
6. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur;
7. Semakin meningkatnya penegakan hukum disegala bidang pembangunan;
8. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur
9. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

Di samping tantangan tersebut di atas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappeda Provinsi Jawa Timur. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Diterapkannya Permendagri 54 Tahun 2010 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun;
3. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Bappeda;
4. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Bappeda Provinsi Jawa Timur;
5. Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;
6. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia;

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Jawa Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi yang belum optimal

Terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi ini, kinerja BAPPEDA dinilai belum berjalan optimal, yang salah satunya disebabkan adanya dualisme tugas dan fungsi antara BAPPEDA dan SKPD lain.

2. Ketersediaan Data terkini yang kurang memadai

Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana data tersebut kurang memadai, disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi perbedaan data dari sumber yang berbeda.

3. Perencanaan Program dan Kegiatan

Masih ditemukannya tumpang tindih program dan kegiatan antar SKPD dan masih adanya ketidak selarasan bahkan ketidak sinkronan antara program dan kegiatan hasil perencanaan pembangunan beserta indikator pendukungnya menyebabkan biasanya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

4. Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terbatasnya SDM Bappeda yang berkompeten dibidangnya menjadi

permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Promosi staf Bappeda ke PD lain tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada, sistem pengkaderan dan manajemen kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.

5. Koordinasi antar-bidang dalam lingkup BAPPEDA belum optimal

Sebagai institusi yang memiliki tugas mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA harus mampu mengkoordinasikan semua bidang yang dalam lingkup internal BAPPEDA.

6. Pengendalian lintas PD khususnya PD Vertikal

Permasalahan lain yang dihadapi BAPPEDA adalah masih adanya ego sektoral yang menyebabkan sulitnya pengendalian lintas PD, khususnya PD vertikal. Selain itu ego sektoral juga masih ditemui baik dalam lingkup internal BAPPEDA maupun antar PD dengan BAPPEDA.

7. Keselarasan hasil Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal;

Hasil perencanaan program pembangunan melalui alokasi anggaran dalam kegiatan-kegiatan membutuhkan peran lebih dari manajemen untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan penganggaran sesuai design perencanaan yang ada, sehingga mobilisasi sumber daya pendukung dan time frame pelaksanaannya dapat berjalan seiring.

8. Batas waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran melampaui batas waktu yang telah diagendakan, sehingga dapat mempengaruhi proses selanjutnya.

9. Penganggaran dan penetapan program prioritas

Permasalahan spesifik di internal BAPPEDA adalah dalam hal penganggaran pada program/kegiatan baik yang ada di internal BAPPEDA maupun pagu anggaran program/kegiatan pada masing-masing PD, dimana dalam penganggarnya belum disesuaikan dengan program/kegiatan yang prioritas.

10. Beban Kerja masing-masing unit kerja Bappeda

Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda serta

distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan Tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap lemahnya pelayanan tupoksinya kepada stakeholdernya;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2041 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah:

" Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"

Jawa Timur Lebih Sejahtera

Peran Bappeda terkait diskripsi dari kata "Jawa Timur Lebih Sejahtera" sebagaimana tersebut diatas mengamanahkan Bappeda untuk menyusun program, kegiatan, penganggaran dan pengendalian pembangunan yang terintegrasi dan holistik yang diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat Jawa Timur menjadi lebih sejahtera disetiap bidang pembangunan.

Jawa Timur Lebih Berkeadilan

Terkait peran Bappeda terkait diskripsi dari kata "Jawa Timur Lebih Berkeadilan" sebagaimana tersebut diatas mengamanahkan agar Bappeda dapat menghasilkan program pembangunan yang berpihak pada rakyat terutama rakyat kurang mampu serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penengendalian program/kegiatan sehingga keterkaitan dalam tahapan proses tersebut mampu menumbuhkan rasa memiliki dan dari rasa memiliki mampu menumbuhkan rasa untuk bangkit dan berusaha.

Jawa Timur Lebih Mandiri

Peran Bappeda terkait diskripsi dari kata "Jawa Timur Lebih Mandiri" sebagaimana tersebut diatas mengamanahkan Bappeda untuk dapat menghasilkan program pembangunan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang di harapkan mampu menciptakan peluang kerja, lapangan kerja dan peningkatan kemampuan daerah disegala bidang.

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing

Peran Bappeda terkait diskripsi dari kata “Jawa Timur lebih berdaya saing” sebagaimana tersebut diatas mengamanahkan Bappeda untuk dapat menghasilkan program pembangunan yang dapat menciptakan kondisi ekonomi sosial timur yang lebih mantap dengan memanfaatkan potensi yang ada terutama didalam menghadapi globalisasi di wilayah Asia maupun dunia.

Jawa Timur Lebih Berakhlak

Peran Bappeda terkait diskripsi dari kata “Jawa Timur Lebih Berakhlak” sebagaimana tersebut diatas mengamanahkan Bappeda untuk menghasilkan program pembangunan yang diupayakan mampu menumbuhkan jati diri seluruh komponen pelaku pembangunan di Jawa Timur menjadi lebih berakhlak dan berbudaya dengan tetap menjaga toleransi bernegara dan bermasyarakat terhadap perbedaan yang ada.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”. Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,” adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri, dan industrialisasi.
3. Misi Ketiga : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Misi Kelima : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Terhadap Lima Misi tersebut maka dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan menjadi motor penggerak utama bagi pelaksanaan pembangunan di daerah dalam pencapaian misi dengan meningkatkan peran koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas seluruh pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan serta meningkatkan peran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan. Peran tersebut perlu dijalankan secara profesional dan bertanggungjawab dengan tetap mempertahankan kualitas perencanaan dengan pendekatan teknokratik dan akademik.

Secara ringkas Tabel 3.1 berikut akan menunjukkan berbagai faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 4: Meningkatkan Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik 1. Program: Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 5. Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Pembangunan	1 Kompetensi dan profesionalisme aparat perencana pembangunan perlu ditingkatkan.	Belum meratanya kompetensi perencanaan pada aparat perencana yang ada	Meningkatkan kedisiplinan melalui SKP dan perjanjian kinerja serta laporan kinerja sesuai <i>output</i> yang dihasilkan
		2 <i>Capacity building</i> kelembagaan perencana pembangunan dirasa masih kurang.	Belum jelasnya posisi/tupoksi Jabatan Fungsional Perencana dalam pelaksanaan tupoksi lembaga.	Peningkatan jumlah Fungsional Perencana dan penambahan pengetahuan melalui diklat perencana
		3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan kurang efektif	Penunjukan SDM perangkat daerah sebagai pelaksana koordinasi sering berubah sehingga koordinasi dilakukan berulang-ulang	Koordinasi Perencanaan Pembangunan difasilitasi dengan sistem

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	6. Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial 7. Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan			

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda

Faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

No	Sasaran Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov Jatim	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Masih Lemahnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tupoksi bappeda Masih lemahnya ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan yang komprehensif Masih lemahnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam sinergitas pembangunan Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengendalian dan 	Terbatasnya SDM perencana dan evaluasi yang capable dan berkompeten dibidangnya Banyaknya Penyelenggaraan media koordinasi yang pelaksanaannya tidak efektif dan menyita waktu.	<ul style="list-style-type: none"> Telah terjalin hubungan yang harmonis antar tingkat pemerintahan Telah tersedianya media komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara berkala antar level pemerintahan Adanya regulasi dan lembaga Adhoc untuk memantau progres program dan kegiatan secara berkala

No	Sasaran Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov Jatim	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
		evaluasi pelaksanaan pembangunan		
2	Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya ketidakpercayaan dari stakeholders di daerah terhadap implementasi program dan kegiatan di daerah Belum maksimalnya koordinasi program/kegiatan pembangunan di daerah 	Rendahnya keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan antar pemerintah di setiap level Belum Jelasnya Implementasi atau breakdown kebijakan Jangka menengah ke Tahunan	Adanya regulasi peraturan yang mendukung proses integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
3	Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP	Rendahnya usulan Kegiatan dari Kab/Kota yang diakomodasi dalam RKPD	Terbatasnya Sumber Pendanaan tidak didukung dengan konsep dan skema penganggaran yang maksimal. Masih Kurang efektifnya proses perencanaan dan penganggaran	Adanya regulasi peraturan yang mendukung proses integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Semakin Meningkatnya Jumlah APBD Provinsi dan APBN dari tahun ke tahun
4	Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/ Presiden	Semakin padatnya beban tugas Bappeda dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus baik dari pemerintah pusat dan Gubernur	Terbatasnya SDM perencana dan evaluasi yang capable dan berkompeten dibidangnya Semakin ketatnya aturan terkait pembiayaan SDM dalam pelaksanaan tugas khusus	Pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif dalam pengkoordinasian pelaksanaan;

Dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Integrasi sinkronisasi dan sinergitas (KISS) yang dilaksanakan secara berkala oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan Bappeda Kabupaten/Kota dan Lembaga Perencanaan di Pemerintah Pusat baik dari Bappenas ataupun dari Direktorat Jendral Bangda Kemendagri dapat dirumuskan

beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan perencanaan di daerah yang perlu mendapat penanganan dan perlu segera dicari solusi pemecahannya.

Beberapa Regulasi kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh beberapa kementrian masih terdapat ke tidak sinkronkan sehingga menyulitkan pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah. Disamping hal tersebut, banyaknya regulasi di tingkat pusat yang mengikut sertakan bappeda sebagai penanggungjawab ataupun anggota tim pelaksanaan tugas, sehingga menambah beban tugas Bappeda dalam pelaksanaannya tugas pokok fungsinya yang diharapkan lebih fokus terhadap penyusunan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan di daerah.

Disamping hal tersebut, banyaknya undangan koordinasi dan sebagainya dari pemerintah pusat semakin memperberat pelaksanaan tugas bappeda di daerah. Sedangkan terkait permasalahan yang dihadapi terkait perencanaan pembangunan dengan pemerintah kabupaten/kota secara umum masih klasik. Eforia Regulasi penguatan pemerintah daerah terkait otonomi daerah masih dirasakan dampaknya sampai saat ini. Lemahnya kapasitas Provinsi didalam mengkoordinasikan serta mensinkronkan rencana dan pelaksanaan pembangunan masih dirasakan. Sehingga masih ditemui program pembangunan yang pelaksanaan tidak lain berlokasi di kabupaten/kota tidak tuntas pelaksanaannya dikarenakan adanya kewenangan kabupaten/kota yang dapat digunakan sehingga menghambat pelaksanaan program pembangunan. Namun dengan adanya regulasi terkait peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat secara bertahap mengurangi eforia otonomi daerah yang ada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan. Dimana tujuan yang ingin dicapai tersebut akan dijawab di dalam kebijakan pengembangan wilayah di Jawa Timur yaitu dengan Pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan

metropolitan di Jawa Timur dan Peningkatan keterkaitan antara kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan.

Kebijakan struktur ruang wilayah terdiri atas pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Kebijakan terkait pengembangan struktur ruang wilayah antara lain :

- a) Mendorong pertumbuhan wilayah di pedesaan dan perkotaan dan juga pemerataan pelayanan agar tidak terjadi pemusatan kegiatan di suatu wilayah.
- b) Pemantapan penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkoneksi dan keterpaduan antarjenis prasarana dan dengan wilayah–wilayah yang dilayaninya secara efisien.

Kebijakan pola ruang Provinsi Jawa Timur mencakup kawasan lindung, budidaya, dan kawasan pesisir dan pulau–pulau kecil. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan menjadi kegiatan budidaya, sedangkan kawasan budidaya dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimum. Pola pemanfaatan ruang wilayah di Propinsi Jawa Timur diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi kawasan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur dibagi berdasarkan tahapan pembangunan, tahapan pembangunan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Pada periode penyusunan renstra bappeda provinsi Jawa Timur, berada pada 2 (dua) tahapan pembangunan, yaitu pada tahap I (2012-2016) dan tahap II (2017-2021).

Pada Tahap Pertama (2012-2016) memiliki prioritas pembangunan :

- a) Peningkatan fungsi dan skala infrastruktur utama dan pendukung fungsi PKN dan PKW
- b) Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan sentra produksi agropolitan serta sentra produksi sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi dan kawasan andalan yang dikaitkan dengan simpul/pusat pengembangannya berupa pengembangan jalan tol, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jaringan kereta api, pelabuhan dan Bandar udara untuk mendukung sentra

produksi yang dikaitkan dengan 38 simpul–simpul/kota pengembangannya

- c) Pengembangan transportasi antar pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal Kepulauan Madura
- d) Pembentukan cluster-cluster produk unggulan pertanian cikal bakal agropolitan
- e) Mengamankan lahan produktif pertanian untuk mencegah/mengendalikan konversi lahan pertanian produktif dan beririgasi teknis
- f) Merehabilitasi kerusakan catchment area dan sumber air
- g) Mempertahankan sumber air dan merehabilitasi daerah resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun
- h) Penetapan dan pengembangan kawasan strategis
- i) Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona/kawasan industri yang telah ditetapkan.

Pada Tahap Kedua (2017-2021) memiliki prioritas pembangunan :

- a) Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung kegiatan PKN dan PKW
- b) Pengembangan transportasi antar pulau dan ekspor untuk mendukung pengembangan komoditi unggulan berorientasi ekspor dan perdagangan antar pulau
- c) Meningkatkan aksesibilitas Jawa Timur untuk mendukung sistem agropolitan
- d) Peningkatan penyediaan lahan pertanian produktif untuk mencapai target 20,03% dari sawah pertanian beririgasi
- e) Mengkoordinasikan penanganan kawasan berfungsi lindung yakni taman nasional, cagaralam, hutan lindung dan lainnya lintas provinsi dan kabupaten kota
- f) Perwujudan konsep kawasan strategis pada masing-masing peruntukan budidaya dan lindung yang sesuai dan telah dicanangkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD dilakukan dengan cara dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholders utama dan para pakar yang memiliki pemahaman terkait isu dan permasalahan pembangunan Jawa Timur. Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran

RPJMD, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor
4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Aktivitas pembangunan periode jangka menengah harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah. Pembangunan jangka menengah Gubernur Jawa Timur dalam periode tahun 2014-2019 dikerangkai dalam tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan pada masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang termuat pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut Bappeda menetapkan beberapa indikator sasaran serta target capaian kinerja yang dibagi selama tahun 2015 sampai tahun 2017 seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2015 - 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Data 2014	TARGET KINERJA SASARAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan kualitas SDM perencana	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional	a. % peningkatan SDM perencana yang berkualitas dan profesional	Jumlah SDM perencana yg berkompentensi Perencana/ Jumlah SDM Perencana keseluruhan	40%	40%	50%	60%		
2	Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif	a. % dokumen perencanaan yang dipublikasikan	a. Jumlah dokumen yang dipublikasikan/ jumlah dokumen yang wajib dipublikasikan	100%	100%	100%	100%		
			b. % usulan stakeholder provinsi yang diakomodir	b. Jumlah usulan yang diakomodir/ jumlah usulan masuk sesuai kriteria	27%	30%	30%	32%		
			c. % ketaatan terhadap tata ruang	c. Jumlah ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan/jumlah pengajuan ijin pemanfaatan ruang yang masuk	70%	70%	70%	70%		
3	Meningkatkan kualitas Data/Informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	a. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	a. Sesuai formula di Lampiran 7 Permendagri 54/2010	90%	95%	95%	95%		
			b. % indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome)	b. Jumlah indikator program yang mencapai 75%/jumlah indikator program	80%	85 %	85 %	86 %		
			c. % SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	c. Jumlah dokumen Renstra SKPD berkualitas baik/ jumlah Renstra PD keseluruhan	75%	80%	80%	82%		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Data 2014	TARGET KINERJA SASARAN				
						2015	2016	2017	2018	2019
			d. % data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	d. Data yang tersedia/data yg dibutuhkan sebagaimana lamp 1 Permendagri 54/2010	80%	80%	85%	85%		

Sedangkan pada Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka selanjutnya Rencana Strategis Bappeda tahun 2018-2019 dijabarkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2018 - 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Data 2016	TARGET KINERJA SASARAN	
							2018	2019
1	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kab/Kota di Jawa Timur	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Berdasarkan LKE pada penilaian evaluasi SAKIP	A	A	A
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	Jumlah Indikator Program yang mencapai 75% / Jumlah Indikator Program	85,81%	87%	88%
				Prosentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	Data yang tersedia/Total data yang dibutuhkan sebagaimana lampiran 1 Permendagri 54/2010	85%	85%	90%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Data 2016	TARGET KINERJA SASARAN	
							2018	2019
		Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	Jumlah dokumen perencanaan yang dipublikasikan/ Jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipublikasikan	100%	100%	100%
				Persentase ketaatan terhadap tata ruang	Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan/ Jumlah Pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang yang Masuk	75%	75%	75%

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur diuraikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	SDM Perencana yang berkualitas dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparat perencana dalam diklat perencanaan pembangunan 2. Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana pembangunan 2. Penilaian pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengalaman dalam penugasan
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas SKPD 2. Mendorong partisipasi aktif stakeholders dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan inovatif 3. Meningkatkan capacity building kelembagaan perencana pembangunan 4. Membangun perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar bidang dan lintas SKPD 5. Melaksanakan forum perencanaan antar stakeholders pembangunan 6. Melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi rencana penataan ruang dan geospasial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar bidang dan lintas SKPD 2. Melaksanakan forum perencanaan antar stakeholders pembangunan 3. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan 4. Membangun perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar bidang dan lintas SKPD 5. Melaksanakan forum perencanaan antar stakeholders pembangunan 6. Melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi rencana penataan ruang dan geospasial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 2. Pengendalian melalui sistem informasi 3. Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan 4. Pemanfaatan sistem perencanaan dan pengendalian melalui optimalisasi SDM dan IT 5. Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah. 6. Peningkatan kerja-sama dengan lembaga penyedia data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi 3. Perencanaan dan pengendalian perencanaan dengan optimalisasi SDM dan sistem IT 4. Pengelolaan dan penyediaan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan akurat 5. Membangun kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan definisi tersebut, maka program yang akan dilakukan PD adalah program yang dapat mendorong tercapainya visi-misi PD, dimana visi misi PD merupakan cerminan dari visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur, yang selanjutnya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adanya perubahan dan/atau penyesuaian dalam dokumen yang diacu, dalam hal ini adalah dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka dokumen perencanaan turunannya, termasuk Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, harus menyesuaikan.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 dan ditindaklanjuti melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Instruksi Mendagri) Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016, maka

perlu diadakan perubahan dalam dokumen perencanaan, termasuk pada dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Instruksi Mendagri Pemerintah Daerah diharapkan segera membentuk peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 serta melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk melalui peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tanggal 27 September 2016 yang selanjutnya diikuti dengan penetapan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai legalitas adanya perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah khususnya pada Bappeda Propinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappeda Provinsi Jawa Timur secara umum tidak berubah, yaitu tetap sebagai lembaga perencana pembangunan di daerah, namun terjadi penyesuaian kedudukan dan susunan organisasi di dalamnya sehingga dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur harus disesuaikan dengan adanya perubahan susunan organisasi perangkat daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai badana perencanaan daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki tugatupoksi yang ditujukan untuk mencapai kelima tujuan tersebut.

Berdasarkan pada peraturan perundangan serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, serta tujuan dan sasaran serta arah dan kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka secara operasional dilakukan penyusunan program dan kegiatan indikatif Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, Bappeda yang semula memiliki 6 (enam) bidang dan 1 (satu) kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang baru saat ini menjadi memiliki 4 (empat) bidang, 1 (satu) kesekretariatan, serta 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT). Perubahan ini menyebabkan adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di sisa waktu periode Renstra Tahun 2014-2019. Namun demikian, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah, penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 juga turut mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi program, setiap kepala bidang/bagian serta kepala UPT di Bappeda yang merupakan eselon III harus memiliki minimal 1 (satu) program yang mendukung ketercapaian sasaran dan tujuan urusan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tupoksinya. Sementara itu, setiap kepala sub bidang/bagian serta kepala seksi yang merupakan eselon IV harus memiliki minimal 1 (satu) kegiatan yang menunjang program bidang/bagian/UPT. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka pada Bappeda Provinsi Jawa Timur telah dilakukan penyusunan program dan kegiatan agar sesuai dengan tupoksi serta struktur organisasi yang baru sebagaimana tertera pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Bappeda Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Revisi Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014-2019

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tetap

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
I-1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	I-1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tetap
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tetap
II-1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	II-1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tetap
II-2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	II-2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tetap
III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Berubah
III-1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	III-1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Berubah
III-2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	III-2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Berubah
III-3	Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	III-3	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	Berubah
III-4	Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional	III-4	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional	Tetap
IV	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	IV	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Tetap
IV-1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	IV-1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tetap
IV-2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	IV-2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Tetap
IV-3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	IV-3	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan
		IV - 4	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Baru
V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	V	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tetap
V-1	Musrenbang Propinsi	V-1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru
V-2	Musrenbang Regional			
V-3	Musrenbang Nasional			
V-4	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota			
V-5	Penyusunan RPJMD			

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
V-6	Penyusunan RKPD			
V-7	Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur			
V-8	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	V-2	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Baru
V-9	Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan
VI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	VI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tetap
VI-1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan dan untuk substansi kegiatan dipindahkan pada kegiatan VI-1, VI-2, dan VI-3 yang baru
VI-2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur			
VI-3	Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan	VI - 1	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Baru
VI-4	Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	VI- 2	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Baru
VI-5	Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM	VI - 3	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Baru
VI-6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	VI - 4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi	Baru
		VI - 5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Baru
		VI - 6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Baru

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
VI-7	Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro	VI - 7	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	Baru
		VI - 8	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	Baru
		VI - 9	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Baru
		VI - 10	Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	Pindahan dari Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
		VI - 11	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)	
		VI - 12	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi	
VII	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	VII	Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Berubah
VII-1	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur	VII-1	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	Baru
VII-2	Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur			
VII-3	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi	VII-2	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Baru
		VII- 3	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	Baru
VII-4	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	VII-4	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Baru
VII-5	Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota	VII-5	Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Baru
VII-6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan	VII-6	Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Baru
VII-7	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan			
VII-8	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan			Substansi kegiatan berubah menjadi

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
VII - 9	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan			kewenangan UPT Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
VII - 10	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan			
VII - 11	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan			
VIII	Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan
VIII-1	Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)			Substansi kegiatan dialihkan pelaksanaannya pada kegiatan yang diampu oleh Bidang/UPT yang sesuai
VIII-2	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur			
VIII-3	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur			
VIII-4	Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)			
VIII-5	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)			
VIII-6	Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)			Substansi kegiatan dialihkan pelaksanaannya pada kegiatan yang diampu oleh Bidang/UPT yang sesuai
VIII-7	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya			
VIII-8	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs			
VIII-9	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak			
VIII-10	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)			
VIII-11	Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan			
VIII-12	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur			

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
IX	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	IX	Program Pembangunan Prasarana Wilayah	Tetap
IX - 1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan dan untuk substansi kegiatan dipindahkan pada kegiatan IX-1, IX-2, dan IX-3 yang baru
IX - 2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur			
IX - 3	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	IX - 1	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Baru
		IX - 2	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Baru
		IX - 3	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Baru
IX - 4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	IX - 4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Baru
		IX - 5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	Baru
		IX - 6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Baru
		IX - 7	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Pindahan dari Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
		IX - 8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan	
X	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
X-1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan dan beberapa substansi kegiatan berubah menjadi kewenangan Bidang Prasarana Wilayah dan UPT Penataan Ruang dan Geospasial
X-2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional			
X-3	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH			
X-4	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH			
XI	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	XI	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	
XI-1	Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan dan untuk substansi kegiatan dipindahkan pada kegiatan IX-1, IX-2, dan IX-3 yang baru
XI-2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan
		XI - 1	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan	Baru
XI-3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan
		XI - 2	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan	Baru
XI-4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	XI - 3	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Berubah
XI-5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	XI - 4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Baru

No	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	No.	Program/Kegiatan Sebelum Revisi	Keterangan
		XI - 5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan	Baru
		XI - 6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Baru
XII	Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan
XII - 1	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan			Pada 2018 – 2019 tidak dilanjutkan dan beberapa substansi kegiatan berubah menjadi kewenangan Bidang Prasarana Wilayah dan UPT Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan
XII - 2	Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan			
		XIII	Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Baru
		XIII - 1	Pelayanan Administrasi UPT	Baru
		XIII - 2	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	Baru
		XIII - 3	Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan	Baru
		XIII - 4	Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)	Baru
		XIV	Program Penataan Ruang dan Geospasial	Baru
		XIV-1	Pelayanan Administrasi UPT	Baru
		XIV-2	Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang	Baru
		XIV-3	Pelayanan dan Pengelolaan Data/Informasi Geospasial	Baru

Catatan:

- a. Nama Program/Kegiatan yang ada di kolom "SEBELUM Revisi" dan tidak ada di kolom "SETELAH Revisi" berarti Program/Kegiatan lama TIDAK DILANJUTKAN
- b. Nama Program/Kegiatan yang ada di kolom "SETELAH Revisi" dan tidak ada di kolom "SEBELUM Revisi" berarti Program/Kegiatan BARU

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcomes, benefit dan impact sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan dan sasaran yang ditujukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Perubahan struktur organisasi telah menyebabkan adanya perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Jawa Timur di sisa periode Renstra 2014 – 2019. Perubahan tersebut juga menyebabkan perubahan beberapa indikator dalam program sebagaimana tertera pada Tabel 5.2 yang menyajikan perbandingan indikator kinerja dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur sebelum dan sesudah revisi.

Tabel 5.2 Indikator Program Bappeda Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Revisi Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Sebelum Revisi		Sesudah Revisi	
Program	Indikator	Program	Indikator
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	<i>Tetap</i>	<i>Tetap</i>
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	<i>Tetap</i>	<i>Tetap</i>
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	<i>Tetap</i>	<i>Tetap</i>
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	<i>Tetap</i>	<i>Tetap</i>
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	<i>Tetap</i>	<i>Tetap</i>
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi
	persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD		Persentase Kabupaten/Kota yang melapor
	persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu		
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	<i>Program sudah tidak dilanjutkan pada 2018 - 2019</i>	<i>Program sudah tidak dilanjutkan pada 2018 - 2019</i>

Sebelum Revisi		Sesudah Revisi	
Program	Indikator	Program	Indikator
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	<i>Tetap</i>	<i>Tetap</i>
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan	<i>Program sudah tidak dilanjutkan pada 2018 - 2019</i>	<i>Program sudah tidak dilanjutkan pada 2018 - 2019</i>
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	<i>Program sudah tidak dilanjutkan pada 2018 - 2019</i>	<i>Program sudah tidak dilanjutkan pada 2018 - 2019</i>
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial	Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan
		Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan
			Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN
			Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Secara rinci sesuai dengan Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD, maka dalam Renstra, khususnya di Bab V, harus diuraikan program, kegiatan, indikator program dan kegiatan beserta target nilainya, dan anggaran indikatif untuk program dan kegiatan yang direncanakan selama periode Renstra sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM Perencana															
Sasaran : SDM perencana yang berkualitas dan profesional															
Indikator Sasaran : Persentase peningkatan tenaga perencana yang profesional															
1	6	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8,650,724,000		7,767,662,000		7,933,287,000			
1	6	1		1	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	100%		100%		100%				
1	6	1	1	9	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			8,650,724,000		7,767,662,000		7,933,287,000			
1	6	1	1	9	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	NA	100%		100%		100%				
1	6	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,725,000,000		7,274,000,000		7,778,960,000			

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	2		1		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100% %	100%		100%		100%							
1	6	2	12		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				2,500,000,000		3,440,000,000		3,835,600,000						
1	6	2	12	1		Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	16 paket	16 paket		16 paket		16 paket							
1	6	2	31		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				4,225,000,000		3,834,000,000		3,943,360,000						
1	6	2	31	1		Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	16 paket	16 paket		16 paket		16 paket							
1	6	7			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				12,619,676,000		13,793,600,000		13,988,072,000						
1	6	7		1		Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100% %	100%		100%		100%							
1	6	7	1		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah				2,699,676,000		2,223,600,000		2,268,072,000						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	7	1	1		Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku		75%		75%		75%							
1	6	7	1	2		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	15 kali	15 kali		15 kali		15 kali							
1	6	7	2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2,420,000,000		1,970,000,000		2,020,000,000							
1	6	7	2	1		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	25 pegawai	22 pegawai		20 pegawai		20 pegawai							
1	6	7	2	2		Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	30 pegawai	30 pegawai		30 pegawai		30 pegawai							
1	6	7	3		Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)			5,000,000,000		7,100,000,000		7,200,000,000							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	7	3	1		Jumlah Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur		18		18		18							
1	6	7	6		Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Orerasional			2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000							
1	6	7	6	1		Jumlah dokumen		4		4		4							
1	6	7	6	2		Jumlah Rapat		20 kali		20 kali		20 kali							
Tujuan : Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan																			
Sasaran : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif																			
Indikator Sasaran : Persentase dokumen yang dipublikasikan																			
1	6	8			Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara-an Pemerintahan			1,646,000,000		1,815,732,000		1,750,246,000							
1	6	8		1	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%		100%		100%								

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	8	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan				833,000,000		892,986,000		883,747,000						
1	6	8	1	1		Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun		5		5		5							
1	6	8	2		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran				478,000,000		530,886,000		514,405,000						
1	6	8	2	1		Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun		3		3		3							
1	6	8	3		Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data				335,000,000		391,860,000		352,094,000						
1	6	8	3	1		Jumlah Update database SKPD		2 paket		2 paket		2 paket							
Indikator Sasaran : Persentase usulan stakeholder provinsi yang diakomodir																			
1	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah				5,769,650,000		6,505,986,000		9,928,513,000						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	2		1		Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	30%	32%		34%		36%							
1	6	2	2		Musrenbang Propinsi				750,000,000		895,000,000		1,249,500,000						
1	6	2	2	1		Jumlah Rapat		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	2	2	2		Jumlah Dokumen kesepakatan usulan prioritas program & kegiatan kab./kota		1		1		1							
1	6	2	3		Musrenbang Regional				370,000,000		407,025,000		447,737,000						
1	6	2	3	1		Jumlah rapat		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	2	3	2		Dokumen kesepakatan program & agenda kegiatan tingkat regional se Jawa-Bali		1		1		1							
1	6	2	3		Musrenbang Nasional				800,000,000		810,000,000		1,431,000,000						
1	6	2	3	1		Jumlah Rapat		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	2	3	2		Konsultasi dan Koordinasi		4 kali		4 kali		4 kali							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	2	4		Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota				550,000,000		520,361,000		1,028,500,000						
1	6	2	4	1		Jumlah pelaksanaan Rapat musrenbang kab/kota	38 kali	38 kali		38 kali		38 kali							
1	6	2	1	3	1	Penyusunan RPJMD			0		0		0						
1	6	2	1	3	1	Jumlah Rapat		-		-		-							
1	6	2	1	3	1	Konsultasi dan koordinasi		0%		0%		0%							
1	6	2	1	3	1	Publikasi Rancangan RPJMD Propinsi Jatim		0%		0%		0%							
1	6	2	1	3	1	Buku RPJMD		0%		0%		0%							
1	6	2	1	3	2	Penyusunan RKPD			788,650,000		855,000,000		1,370,500,000						
1	6	2	1	3	2	Jumlah Rapat		5 kali		5 kali		5 kali							
1	6	2	1	3	2	Konsultasi dan Koordinasi		4 kali		4 kali		4 kali							
1	6	2	1	3	2	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Provinsi Jatim	2	2		2		2							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	2	1	3	4	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur			700,000,000		730,000,000		1,068,000,000						
1	6	2	1	3	4	1	Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali						
1	6	2	1	3	5	Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran			671,000,000		884,600,000		1,248,876,000						
1	6	2	1	3	5	1	Tersedianya data base dalam proses penyusunan Perubahan APBD dan APBD		2 paket		2 paket		2 paket						
1	6	2	1	3	6	Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur			1,140,000,000		1,404,000,000		2,084,400,000						
1	6	2	1	3	6	1	Jumlah Rapat		2 kali		2 kali		2 kali						
1	6	2	1	3	6	2	Konsultasi dan Koordinasi		4 kali		4 kali		4 kali						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	2	1	3	6		2	2		2		2							
1	6	2				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			5,550,000,000		4,580,282,000		4,669,658,000						
1	6	2			1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	42%	46%		48%		50%							
1	6	2	1	3	8	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur			550,000,000		620,326,000		617,094,000						
1	6	2	1	3	8			2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	2	1	3	8			1 kali		1 kali		1 kali							
1	6	2	1	3	9	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur			500,000,000		568,326,000		567,094,000						
1	6	2	1	3	9			1 kali		1 kali		1 kali							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	2	1		Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro				500,000,000		568,326,000		567,094,000						
1	6	2	1	1		Jumlah Rapat Koordinasi		1 kali		1 kali		1 kali							
1	6	2	1	2		Jumlah Rapat		24 kali		24 kali		24 kali							
1	6	2	1	3		Jumlah Konsultasi		4 kali		4 kali		4 kali							
1	6	2	1	4		Jumlah Koordinasi		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	2	1	2	Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan				700,000,000		778,326,000		792,094,000						
1	6	2	1	1		Jumlah Konsultasi		4 kali		4 kali		4 kali							
1	6	2	1	3	Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha				700,000,000		778,326,000		792,094,000						
1	6	2	1	1		Jumlah Rapat		24 kali		24 kali		24 kali							
1	6	2	1	4	Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM				600,000,000		673,326,000		667,094,000						
1	6	2	1	1		Jumlah Rapat		24 kali		24 kali		24 kali							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	2	1		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi				2,000,000,000		593,326,000		667,094,000						
1	6	2	1	1		Jumlah Dokumen		4		4		4							
1	6	3			Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah				8,040,000,000		8,560,782,000		8,612,064,000						
1	6	3		1		Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	7 kegiatan	7 kegiatan		6 kegiatan		6 kegiatan							
1	6	3	1		Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)				700,000,000		768,326,000		767,094,000						
1	6	3	1	1		Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi		3,3,15 kegiatan		3,3,15 kegiatan		3,3,15 kegiatan							
1	6	3	5		Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)				250,000,000		293,326,000		0						
1	6	3	5	1		Jumlah Dokumen		6		6		0							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	7		Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur				550,000,000		620,826,000		627,094,000						
1	6	3	7	1		Jumlah Rapat Koordinasi		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	3	7	2		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	3	7	8		Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)			500,000,000		568,326,000		567,094,000						
1	6	3	7	8	1		Jumlah Rapat Koordinasi		2 kali		2 kali		2 kali						
1	6	3	7	8	2		Jumlah Koordinasi		2 kali		2 kali		2 kali						
1	6	3	7	9		Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)			400,000,000		463,326,000		467,094,000						
1	6	3	7	9	1		Jumlah Rapat Koordinasi		2 kali		2 kali		2 kali						
1	6	3	7	9	2		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		2 kali		2 kali		2 kali						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	1		Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)				250,000,000		0		0						
1	6	3	1	1		Koordinasi,Konsultasi dan Rakor		8 kali		0		0							
1	6	3	1	6	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Masyarakat dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya				300,000,000		330,000,000		363,000,000						
1	6	3	1	1		Jumlah Rapat		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	3	1	2		Jumlah Dokumen	Dokumen	2		2		2							
1	6	3	1	7	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs				550,000,000		605,000,000		665,500,000						
1	6	3	1	1		Jumlah Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan							
1	6	3	1	2		Jumlah Dokumen		2		2		2							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	1		Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak				650,000,000		715,000,000		786,500,000						
1	6	3	1	1		Jumlah Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan							
1	6	3	1	2		Jumlah Dokumen		1		1		1							
1	6	3	2		Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)				200,000,000		220,000,000		242,000,000						
1	6	3	2	1		Jumlah Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan							
1	6	3	2		Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan				1,000,000,000		1,043,326,000		1,017,094,000						
1	6	3	2	1		Fasilitasi Sinergitas TSP		4 kali		4 kali		4 kali							
1	6	3	2		Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur				1,940,000,000		2,108,326,000		2,202,094,000						
1	6	3	2	1		Jumlah Rapat		3 kali		7 kali		7 kali							
1	6	3	2	2		Jumlah Konsultasi		4 kali		10 kali		10 kali							
1	6	3	2	3		Jumlah Koordinasi		4 kali		12 kali		12 kali							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	3		Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur				750,000,000		825,000,000		907,500,000						
1	6	3	3	1		Jumlah Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan		5 Kegiatan							
1	6	3	3	2		Jumlah Dokumen		2		2		2							
1	6	3	8		Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah				6,475,000,000		7,386,672,000		7,984,188,000						
1	6	3	8	1		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	30%	32%		34%		36%							
1	6	3	8	1	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah				2,750,000,000		3,093,346,000		3,367,094,000						
1	6	3	8	1	1	Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi		3,9,38 kali		3,9,38 kali		3,9,38 kali							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	2		Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur				450,000,000		500,000,000		550,000,000						
1	6	3	2			jumlah Rakor/FGD		3 kali		3 kali		3 kali							
1	6	3	3		Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur				450,000,000		500,000,000		550,000,000						
1	6	3	3			jumlah rakor/FGD		3 kali		3 kali		3 kali							
1	6	3	4		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah				2,825,000,000		3,293,326,000		3,517,094,000						
1	6	3	4	1		Jumlah Kajian / Dokumen		7		7		7							
1	6	3	9		Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan				5,500,000,000		5,586,652,000		5,534,188,000						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	9	1		Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100%	100%		100%		100%							
1	6	3	9	1	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan			4,900,000,000		4,943,326,000		4,917,094,000							
1	6	3	9	1	1	jumlah rapat		9 kali		9 kali		9 kali							
1	6	3	9	1	2	Jumlah Dokumen		3		3		3							
1	6	3	9	2	Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan			600,000,000		643,326,000		617,094,000							
1	6	3	9	2	1	Jumlah Dokumen		3		4		4							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	4	3		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan				5,200,000,000		5,838,326,000		6,301,594,000						
1	6	4	3		1	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	18%	20%		23%		26%							
1	6	4	3	1		Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan			800,000,000		880,000,000		968,000,000						
1	6	4	3	1	1		Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali						
1	6	4	3	2		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur			1,650,000,000		1,815,000,000		1,996,500,000						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	4	2	1		Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali							
1	6	4	3		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Masyarakat			1,000,000,000		1,100,000,000		1,210,000,000							
1	6	4	3	3	1	Jumlah Rapat		4 kali		4 kali		4 kali							
1	6	4	3	6		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Masyarakat			750,000,000		943,326,000		917,094,000						
1	6	4	3	6	1	Jumlah Dokumen		3		3		3							
1	6	4	3	7		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat			1,000,000,000		1,100,000,000		1,210,000,000						
1	6	4	3	7	1	Jumlah Kegiatan Rapat		4 kali		4 kali		4 kali							
1	6	4	3	7	2	Jumlah Dokumen		4		4		4							
Indikator Sasaran : Persentase ketaatan terhadap tata ruang																			

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	40			Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional				7,070,500,000		8,627,355,000		9,422,282,000						
1	6	40		1		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	26%	28%		30%		32%							
1	6	40	1		Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional				77,505,000		128,582,000		110,876,000						
1	6	40	1	1		Jumlah dokumen		2		2		2							
1	6	40	2		Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional				112,620,000		167,208,000		153,364,000						
1	6	40	2	1		Jumlah dokumen		2		2		2							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	4	3		Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH				4,130,375,000		4,762,739,000		5,208,448,000						
1	6	4	3	1		Jumlah rapat dan Koordinasi kab/kota		6 Rakor, 2 Paket Konsult a-si Pusat, 2 Paket Koordin a-si Kab/ Kota		6 Rakor, 2 Paket Konsult a-si Pusat, 2 Paket Koordin a-si Kab/ Kota		6 Rakor, 2 Paket Konsult a-si Pusat, 2 Paket Koordin a-si Kab/ Kota							
1	6	4	4		Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH				2,750,000,000		3,568,826,000		3,949,594,000						
1	6	4	4	1		Jumlah dokumen		7		7		7							
1	6	4	4	2		Jumlah Rapat		6 kali		6 kali		6 kali							
1	6	4	4	3		Jumlah Konsultasi		2 kali		2 kali		2 kali							
Tujuan : Meningkatkan kualitas data/informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah																			
Sasaran : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu																			
Indikator Sasaran :																			
1. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan																			
2. Persentase program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%																			
3. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan																			
4. Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik																			

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	6		Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan				9,638,850,000		10,937,321,000		11,967,039,000						
1	6	3	6	1		persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	70%	72%		74%		76%							
1	6	3	6	2		persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD	83%	85%		88%		91%							
1	6	3	6	3		persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu	58%	60%		62%		65%							
1	6	3	6	1	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan				1,000,000,000		1,043,326,000		1,017,094,000						
1	6	3	6	1	1		Jumlah Dokumen		4		4		4						
1	6	3	6	1	2		Jumlah Rapat		2 kali		2 kali		2 kali						
1	6	3	6	2		Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan			500,000,000		593,326,000		622,094,000						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	2	1		Jumlah Dokumen		5		5		5							
1	6	3	3		Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan			800,000,000		923,326,000		985,094,000							
1	6	3	3	1		Penayangan		6 kali		6 kali		6 kali							
1	6	3	3	2		Jumlah Media		5 paket		5 paket		5 paket							
1	6	3	4		Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan			500,000,000		593,326,000		622,094,000							
1	6	3	4	1		Jumlah rapat		2 kali		2 kali		2 kali							
1	6	3	5		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur			800,000,000		923,326,000		985,094,000							
1	6	3	5	1		Jumlah Dokumen		1		1		1							
1	6	3	6		Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota			500,000,000		593,326,000		622,094,000							
1	6	3	6	1		Jumlah pelaksanaan konsultasi RPJPD dan RPJMD		8 Kali		8 Kali		8 Kali							

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	7		Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur				200,000,000		263,326,000		259,094,000						
1	6	3	7	1		Jumlah permintaan bahan RESES		3 kali		3 kali		3 kali							
1	6	3	8		Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi				700,000,000		823,326,000		985,094,000						
1	6	3	8	1		Jumlah Laporan SKPD		4		4		4							
1	6	3	9		Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota				1,133,000,000		1,289,626,000		1,388,024,000						
1	6	3	9	1		Jumlah laporan	2	2		2		2							
1	6	3	10		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan				3,000,000,000		3,253,326,000		3,768,094,000						
1	6	3	10	1		Jumlah Dokumen		6		6		6							
1	6	3	11		Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan				505,850,000		637,761,000		713,169,000						

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	6	3	1	1		Jumlah laporan dana DK, TP dan UB, DAK serta UKP4 (dokumen)	12	12		12									
Jumlah									82,885,40 0,000		88,674,37 0,000		95,870,09 1,000						

Keterangan:

*) Pada tahun 2018 – 2019 terjadi perubahan program/kegiatan serta target dan pagu anggaran pada masing – masing program/kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan dari tahun 2015 – 2017 termasuk terdapat program/kegiatan yang dihapus dan ditambahkan

Tabel 5.4 Perubahan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur 2018-2019

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi jawa Timur dan kab/Kota di jawa Timur																			
Sasaran : SDM Perencana yang berkualitas dan Profesional																			
Indikator Sasaran : Persentase peningkatan tenaga perencana yang profesional																			
3	6	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									2.000.000.000		2.250.000.000		4.250.000.000	
3	6	1		101		Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturn terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor							100%		100%		100%		
3	6	1	19		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran									2.000.000.000		2.250.000.000		4.250.000.000	
3	6	1	19	1		Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran							100%		100%		100%		
3	6	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									10.450.000.000		11.800.000.000		22.250.000.000	
3	6	2		201		Prosentase sarana dan prasarana aparaturn yang layak fungsi							100%		100%		100%		
3	6	2	12		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana									3.500.000.000		3.900.000.000		7.400.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	2	12	1							100%		100%		
3	6	2	31								6.950.000.000		7.900.000.000		14.850.000.000
3	6	2	31	1							100%		100%		
3	6	7									8.800.000.000		9.600.000.000		18.400.000.000
3	6	7		701							100%		100%		
3	6	7	1								1.500.000.000		1.750.000.000		6.250.000.000
3	6	7	1	1							15 kali		15 kali		15 kali
3	6	7	2								1.500.000.000		1.850.000.000		3.350.000.000
3	6	7	2	1							20 pegawai		20 pegawai		20 pegawai

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 6 7 2 2		Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM								200 pegawai		200 pegawai		200 pegawai	
3 6 7 3	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)										4.300.000.000		4.500.000.000		8.800.000.000
3 6 7 3 1		Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur								8		8		8	
3 6 7 6	Pelaksanaan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis										1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000
3 6 7 6 1		Jumlah dokumen								1		1		1	
3 6 8	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan										6.750.000.000		7.650.000.000		14.400.000.000
3 6 8		persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu								100%		100%		100%	
3 6 8 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan										950.000.000		1.100.000.000		2.050.000.000
3 6 8 1 1		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun								4		5		5	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	8	2		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran										800.000.000		900.000.000		1.700.000.000
3	6	8	2	1		Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun								1		1		1	
3	6	8	4		Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan										5.000.000.000		5.650.000.000		10.650.000.000
3	6	8	4	1		Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun								1		1		1	
Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan																			
Sasaran : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif																			
Indikator Sasaran : 1. Persentase dokumen perencaan yang dipublikasikan																			
3	6	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah										11.000.000.000		12.500.000.000		23.500.000.000
3	6	21		101		Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan								38%		40%		40%	
3	6	21	#		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur										3.500.000.000		3.900.000.000		7.400.000.000
3	6	21	#	1		Jumlah Dokumen								3		3		3	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	21	#		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah										7.500.000.000		8.600.000.000		16.100.000.000
3	6	21	#	1		Jumlah Dokumen								4		5		5	
3	6	22			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi										11.000.000.000		12.000.000.000		23.000.000.000
3	6	22		201		Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan								52%		54%		54%	
3	6	22	#		Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro										250.000.000		250.000.000		500.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen								1		1		1	
3	6	22	#		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi										1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen								3		3		3	

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	22	#		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan											1.500.000		1.500.000.		3.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									3		3		3	
3	6	22	#		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									3		3		3	
3	6	22	#		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi											1.000.000.000		1.350.000.000		2.350.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									4		5		5	
3	6	22	#		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan											1.250.000.000		1.600.000.000		2.850.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									5		6		6	
3	6	22	#		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											1.000.000.000		1.300.000.000		2.300.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									4		5		5	
3	6	22	#		Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur											750.000.000		750.000.000		1.500.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									1		1		1	
3	6	22	#		Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)											750.000.000		750.000.000		1.500.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									1		1		1	
3	6	22	#		Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif											250.000.000		250.000.000		500.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									1		1		1	
3	6	22	#		Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan											250.000.000		250.000.000		500.000.000
3	6	22	#	1		Jumlah Dokumen									1		1		1	

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	22	#			Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi										1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000
3	6	22	#	1			Jumlah Dokumen								1		1		1	
3	6	38				Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah										11.000.000.000		12.000.000.000		23.000.000.000
3	6	38			801		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan								38%		40%		40%	
3	6	38	5			Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan										1.300.000.000		1.400.000.000		2.700.000.000
3	6	38	5	1			Jumlah Dokumen								3		3		3	
3	6	38	6			Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya										1.000.000.000		1.100.000.000		2.100.000.000
3	6	38	6	1			Jumlah Dokumen								4		4		4	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	38	7		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air										1.300.000.000		1.400.000.000		2.700.000.000
3	6	38	7	1		Jumlah Dokumen								3		3		3	
3	6	38	8		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan										2.250.000.000		2.450.000.000		4.700.000.000
3	6	38	8	1		Jumlah Dokumen								5		5		5	
3	6	38	9		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya										2.200.000.000		2.400.000.000		4.600.000.000
3	6	38	9	1		Jumlah Dokumen								5		5		5	
3	6	38	10		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air										2.200.000.000		2.400.000.000		4.600.000.000
3	6	38	10	1		JumlahDokumen								5		5		5	

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	38	11		Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)											600.000.000		650.000.000		1.250.000.000
3	6	38	11	1		Jumlah Dokumen									2		2		2	
3	6	38	12		Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan											150.000.000		200.000.000		350.000.000
3	6	38	12	1		Jumlah Dokumen									1		1		1	
3	6	44			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya											11.000.000.000		12.000.000.000		23.000.000.000
3	6	44		401		Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan								29%			32%		32%	
3	6	44	1		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat											2.470.000.000		2.750.000.000		7.170.000.000
3	6	44	1	1		Jumlah Dokumen									1		1		1	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	44	2		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan										2.465.000.000		2.850.000.000		7.165.000.000
3	6	44	2	1		Jumlah Dokumen								1		1		1	
3	6	44	3		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat										2.465.000.000		2.850.000.000		7.165.000.000
3	6	44	3	1		Jumlah Dokumen								1		1		1	
3	6	44	4		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat										250.000.000		250.000.000		500.000.000
3	6	44	4	1		Jumlah Dokumen								1		1		1	
3	6	44	5		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan										250.000.000		250.000.000		500.000.000
3	6	44	5	1		Jumlah Dokumen								1		1		1	
3	6	44	6		Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat										250.000.000		250.000.000		500.000.000

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	44	6	1		Jumlah Dokumen								1		1		1	
3	6	44	8		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya									2.850.000.000		2.850.000.000			
3	6	44	8	1		Jumlah Dokumen								3		3		3	
Indikator Sasaran : 2. Persentase ketaatan terhadap tata ruang																			
3	6	46			Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial									7.500.000.000		8.000.000.000		15.500.000.000	
3	6	46		601		Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan							30%		40%		40%		
3	6	46	1		Pelayanan Administrasi UPT									1.000.000.000		1.100.000.000		2.100.000.000	
3	6	46	1	1		Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT							100%		100%		100%		
3	6	46	6		Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang									3.500.000.000		3.700.000.000		7.200.000.000	
3	6	46	6	1		Jumlah Dokumen								3		3		3	

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	46	7		Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial										3.000.000.000		3.200.000.000		6.200.000.000
3	6	46	7	1		Jumlah Dokumen								3		3		3	
Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan																			
Indikator Sasaran : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu																			
Indikator Sasaran : 1. Persentase program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%																			
3	6	45			Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah										11.000.000.000		12.000.000.000		23.000.000.000
3	6	45		501		Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi								100%		100%		100%	
3	6	45		502		Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor								25%		26%		26%	
3	6	45	1		Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah										895.000.000		975.000.000		1.870.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	45	1	1						12		12		12	
		Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer dari Pemerintah Pusat													
3	6	45	2								515.000.000		570.000.000		1.085.000.000
		Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah													
3	6	45	2	1						2		2		2	
		Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah													
3	6	45	2	2						2		2		2	
		Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah													
3	6	45	3								650.000.000		750.000.000		1.400.000.000
		Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota													
3	6	45	3	1						2		2		2	
		Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota													
3	6	45	4								750.000.000		850.000.000		1.600.000.000
		Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota													

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	45	4	1		Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi									100%		100%		100%	
3	6	45	5		Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah											1.500.000.000		1.200.000.000		2.700.000.000
3	6	45	5	1		Jumlah dokumen LKPJ									2		1		1	
3	6	45	5	2		Jumlah dokumen Reses									3		3		3	
3	6	45	6		Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah											6.690.000		7.655.000.		14.345.000.000
3	6	45	6	1		Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah									4		4		4	
Indikator Sasaran : 2. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan																				
3	6	47			Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan											7.500.000.000		8.000.000.000		15.500.000.000

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	47		701		Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan (seharusnya tidak menggunakan satuan %)								75%		80%		80%		
3	6	47		702		Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN								11%		12%		12%		
3	6	47		703		Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan								75%		80%		80%		
3	6	47	4		Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)									2.000.000.000		2.150.000.000		4.150.000.		
3	6	47	4	1		Jumlah Dokumen								4		4		4		
3	6	47	5		Pelayanan Administrasi UPT									1.250.000.000		1.350.000.000		2.600.000.000		
3	6	47	5	1		Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT								100%		100%		100%		
3	6	47	6		Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan									2.500.000.000		2.650.000.000		5.150.000.000		

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018*)		Tahun 2019*)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6	47	6	1		Jumlah Dokumen									13		13		13	
3	6	47	7		Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan											1.750.000.000		1.850.000.000		3.600.000.000
3	6	47	7	1		Jumlah Sistem Informasi									4 Aplikasi		4 Aplikasi		4 Aplikasi	
TOTAL																98.000.000.000		107.800.000.000		##### ###

BAB 6

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sebagaimana telah tertuang pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Bappeda pada Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditunjang oleh program/kegiatan dari Sekretariat, Bidang Perencana dan Bidang pengendalian/Evaluasi. Ketujuh indikator kinerja tersebut digunakan sebagai pengukur ketercapaian kinerja Bappeda hingga tahun 2017 seperti digambarkan pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2017

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015		2016		2017		2018		2019		
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
2	Persentase usulan stakeholder yang terakomodir di dalam dokumen perencanaan	28%	30%	46,5%	30%	42%	32%		32%		35%		35%
3	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%	70%	75,32%	70%	75%	70%		70%		70%		70%
4	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	90%	95%	98,62%	95%	96%	95%		95%		95%		95%
5	Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	80%	80%	87,50%	85%	85,81%	86%		87%		88%		88%
6	Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	80%	80%	90%	85%	85%	85%		85%		90%		90%
7	Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik	75%	80%	82,75%	80%	82,75%	82%		82%		85%		85%

Keterangan : T = Target; R = Realisasi

Pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 ini juga menyebabkan adanya pergeseran pada indikator sasaran Bappeda. Hal tersebut berkaitan dengan penjabaran indikator Bappeda yang terbagi menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran. Dalam kaitannya dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, indikator tujuan pada Renstra merupakan Indikator sasaran pada Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dijabarkan pada tabel 6.2 dan Tabel 6.3.

Tabel 6.2 Tujuan dan Indikator Tujuan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2019

No	Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan (RENSTRA)	Indikator Tujuan (RENSTRA)	Target	
					2018	2019
1	Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak	Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kab/Kota di Jawa Timur	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	90%	95%
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	100%
				Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	32%	34%

Tabel 6.3 Perubahan Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Perubahan)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
Indikator Tujuan : Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan								
1	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100%				100 %	100 %	100%
2	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	75%				75%	75%	75%
Indikator Tujuan : Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD								
3	Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	85,81%				87%	88%	88%
4	Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	85%				85%	90%	90%

BAB 7

PENUTUP

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BAPPEDA, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA.